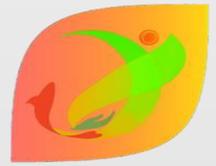




TERAKREDITASI MADYA



**RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**TAHUN 2021-2026**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**  
**KABUPATEN BENGKALIS**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RENSTRA Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yaitu : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS**

**YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman RSUD Kecamatan Mandau dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan RSUD Kecamatan Mandau sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga dengan adanya Renstra Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan RSUD Kecamatan Mandau menjadi lebih fokus dan lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Duri, September 2021

Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Kecamatan Mandau



**dr. CHAIRIAH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740419 200311 2 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	17
2.2.2. Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.3.1. Perspektif Pelanggan/customer .....	25
2.3.2. Perspektif Keuangan.....	29
2.3.3. Perspektif Proses Bisnis Internal (PBI).....	31
2.3.4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran.....	47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>60</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	67

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 .....	72
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) & Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	75
3.5. Penentuan Isu Strategis.....	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	92
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	101
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	105
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	123
BAB VIII PENUTUP .....	127
8.1. Kesimpulan.....	127
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau Menurut Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2	Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau Menurut Golongan .....	18
Tabel 2.3	Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau Menurut Eselon .....	19
Tabel 2.4	Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan.....	19
Tabel 2.5	Komposisi Tenaga Kesehatan RSUD Kecamatan Mandau Menurut Jenis Profesinya .....	20
Tabel 2.6	Daftar asset yang dimiliki oleh RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	22
Tabel 2.7	Rincian Capaian Kinerja Perspektif Pelanggan.....	25
Tabel 2.8	Cakupan Kunjungan Pasien.....	28
Tabel 2.9	Realisasi Target pendapatan BLUD .....	29
Tabel 2.10	Analisa Laporan .....	30
Tabel 2.11	Capaian Akreditasi RSUD Kecamatan Mandau .....	32
Tabel 2.12	Kualitas Tempat Tidur RSUD Kecamatan Mandau.....	33
Tabel 2.13	Capaian Standar Minimal (SPM)Daerah RSUD Kecamatan Mandau.	36
Tabel 2.14	Capaian Fungsi RSUD Kecamatan Mandau sebagai wahana pendidikan .....	45
Tabel 2.15	Capaian Pengembangan SIM RS Tahun 2016-2020 .....	47
Tabel 2.16	Capaian Standar Kompetensi Di RSUD Kecamatan Mandau .....	48
Tabel 2.17	Diklat Pegawai RSUD Kecamatan Mandau Tahun 216-2020.....	48
Tabel 2.18	Rekapitulasi Pelanggar Displin Tahun 2016-2020 .....	49
Tabel 2.19	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau .....	50
Tabel 2.20	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 1916-1920 .....	54
Tabel 2.21	Upaya Strategis dalam Pengembangan pelayanan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 .....	58
Tabel 3.1.	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	64
Tabel 3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	71

Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	74
Tabel 3.4	Analisa Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kabupaten Bengkalis.....	76
Tabel 3.5	Analisa SWOT.....	84
Tabel 3.6	Key Performance Indicators.....	88
Tabel 3.7	Inisiatif Strategis.....	89
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	94
Tabel 4.2	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kerja Unit Pelayanan RSUD Kecamatan.....	96
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2021-2026.....	103
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pendanaan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026.....	113
Tabel 6.2	Keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, Strategi dan arah Kebijakan RPJMD dan Renstra RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.....	118
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	125

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	12
Gambar 3.1 Kerangka Permasalahan Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau .....	63
Gambar 3.2 Peta Strategis .....	87
Gambar 6.1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah .....	105

**DAFTAR GRAFIK**

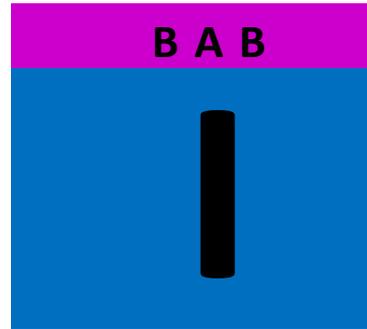
Grafik 2.1	Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2016-2020 .....	53
------------	-----------------------------------------------------------------------	----

## PENDAHULUAN

---

*Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra RSUD Kecamatan Mandau.*

---



### 1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Kecamatan Mandau memiliki komitmen terus-menerus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan. Secara umum pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Hal ini penting karena kesehatan merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan

yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir risiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra RSUD Kecamatan Mandau disusun sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit dan pelaksanaan rujukan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejak 2014 RSUD Kecamatan Mandau telah ditetapkan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), dalam Permendagri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dijelaskan bahwa salah satu tugas pemimpin BLUD adalah menyusun Renstra. Renstra tersebut merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra RSUD Kecamatan Mandau adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Rencana Strategis RSUD Kecamatan Mandau disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, wawancara dan menyebarkan formulir-formulir pengumpulan data. Adapun metode pengukuran kinerja dan rencana pengembangan layanan dalam Rencana Strategis dianalisis menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. Pendekatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertanggung jawaban dengan menggunakan *Strategic Based Responsibility*, yang berarti seluruh unit layanan yang ada di RSUD Kecamatan Mandau diukur kinerjanya berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu meliputi perspektif pelanggan/customer, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal (PBI) dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (PP). Metode ini secara komprehensif mempertimbangkan seluruh perspektif dalam merumuskan strategi manajemen RSUD Kecamatan Mandau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga Visi dan Misi Bupati Bengkalis dapat terwujud.

Renstra RSUD Kecamatan Mandau harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yang dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di beberapa sektor yang salah satunya adalah sektor kesehatan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra RSUD Kecamatan Mandau karena melalui analisis kesejahteraan sosial tersebut tertuang tantangan pelayanan RSUD Kecamatan Mandau dalam mendorong perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Renstra RSUD Kecamatan Mandau juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kecamatan Mandau karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum RSUD Kecamatan Mandau dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
  20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
  22. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
  27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

28. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 529 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra RSUD Kecamatan Mandau dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit dan pelaksanaan perujukan;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Kecamatan Mandau.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan RSUD Kecamatan Mandau, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---



---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah*

---

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Kecamatan Mandau adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik dan penunjang medik.

Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan uraian sebagai berikut:

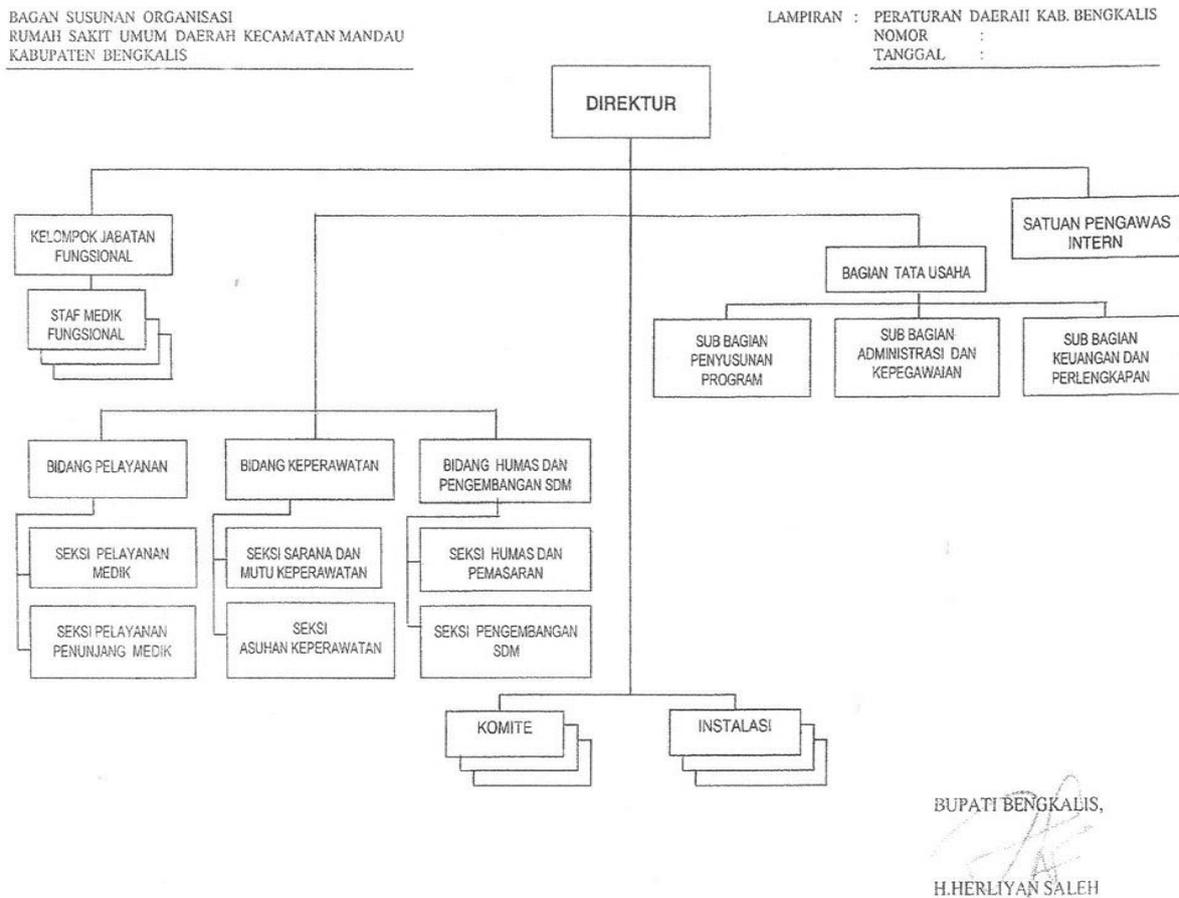
RSUD Kecamatan Mandau memiliki tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas RSUD Kecamatan Mandau memiliki fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialistik;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 6) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- 7) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- 8) Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**



**Sumber :** Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2012,

### **2.1.1 Manajemen SDM**

Struktur ini mengorganisir Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 710 orang dengan berbagai jenjang pendidikan mulai dari SMP sampai dengan jenjang S3 dan jenis pendidikan sesuai profesi yang dibutuhkan oleh rumah sakit dari berbagai disiplin ilmu. Manajemen SDM meliputi kebijakan yang mengatur SDM/karyawan rumah sakit dengan rekrutmen, orientasi, rotasi, mutasi, cuti, diklat, promosi dan lain lain.

### **2.1.2 Manajemen Keuangan/Pembiayaan**

Manajemen keuangan/pembiayaan mulai dari menyusun perencanaan pembiayaan sampai laporan pertanggungjawaban. RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis memiliki sumber pembiayaan dari pendapatan operasional, APBD, APBN dan pendapatan lain yang sah. RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 529/KPTS/XII/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka penerapan prinsip dan azas tersebut maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK/Standar Akuntansi Keuangan) dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Dalam pengelolaan rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraannya RSUD Kecamatan Mandau masih mendapatkan subsidi pemerintah. Subsidi pengadaan barang/jasa dapat bersumber dari APBD, APBD Provinsi Riau maupun APBN. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur pengelolaan PPK-BLUD, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan RSUD Kecamatan Mandau sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
3. Keputusan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan PPK-BLUD;
4. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola;
5. Keputusan Bupati tentang Sistem Akuntansi;
6. Keputusan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa;
7. Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
8. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional;
9. Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
10. Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
11. Keputusan Bupati tentang Tarif Layanan Parkir;
12. Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama.

### **2.1.3 Manajemen Lingkungan**

RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis juga melaksanakan pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit, sistem akuntabilitas dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja didasarkan pada hasil capaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai persyaratan penerapan PPK-BLUD. Kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit diimplementasikan berupa pemantauan, pemeriksaan mutu lingkungan dan pengelolaan rumah sakit. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit terdiri dari :

1. Penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit
2. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu
3. Penyehatan air
4. Pengawasan dekontaminasi melalui desinfeksi & sterilisasi
5. Pengawasan pengamanan radiasi
6. Pengawasan pengelolaan makanan dan minuman
7. Pengawasan tempat pencucian umum/*laundry*
8. Limbah padat

9. Limbah cair
10. Limbah gas
11. Limbah B3

#### **2.1.4 Manajemen Logistik dan Aset**

Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit perlu didukung dengan logistik yang memadai. Manajemen logistik mulai dari proses perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material/alat kesehatan/unit. Logistik rumah sakit meliputi dari cetakan, ATK, makanan pasien, gas medis, obat dan perbekalan kesehatan termasuk linen, bahan bakar dll. Aset rumah sakit perlu dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, pemeliharaan sampai dengan penghapusan seluruh peralatan kesehatan harus memenuhi standar, uji fungsi dan kalibrasi karena merupakan pendukung terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

#### **2.1.5 Manajemen Informasi**

Data dalam manajemen merupakan salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diamanatkan Rumah Sakit wajib memelihara rekam medis pasien termasuk kerahasiaannya, penyimpanan dan pengolahan dan pemusnahannya. Data yang dimiliki Rumah Sakit sangat kompleks antara lain data pasien, data pelayanan, data administrasi, data keuangan dll, sehingga perlu dikelola secara profesional dan terstruktur dan sudah tidak memungkinkan dikelola secara manual. Oleh karena itu Rumah Sakit perlu mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) yang baik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah menerapkan SIM RS, termasuk melakukan sosialisasi kelengkapan catatan medis pasien menggunakan ICD X yang merupakan Kode Diagnosa Internasional dan ICD IX yaitu Kode Tindakan Internasional yang dimulai sejak penerapan Jamkesmas.

### **2.1.6 Manajemen Mutu dan *Patient Safety***

Pelayanan rumah sakit objeknya adalah manusia sehingga mutu dan keselamatan pasien harus diutamakan walaupun rumah sakit menganut azas efisiensi. Keselamatan pasien merupakan salah satu fokus pelayanan karena pasien bukan hanya membutuhkan pengobatan tetapi perlu dilindungi. Untuk melaksanakan upaya keamanan pasien telah dibentuk Tim *Patient Safety* yang bertugas menyusun standar, memantau pelaksanaan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi manajemen tentang keselamatan pasien. Hal lain yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit adalah dibentuknya tim manajemen mutu pelayanan yang mencakup mutu klinik, mutu pembiayaan, dan mutu kinerja.

RSUD Kecamatan Mandau telah mendapatkan akreditasi versi 2019 Tingkat Madya dengan Sertifikat Nomor KARS-SERT/955/IX/2019 berlaku mulai 20 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2022. Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa RSUD Kecamatan Mandau telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit yang meliputi Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Pelayanan Farmasi, K3, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit, Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi, Pelayanan Gizi, dan Pelayanan Intensif. dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001-2008 untuk pelayanan di IGD pada tahun 2013 serta untuk rawat inap dan rawat jalan pada tahun 2015 dan 2016. Dengan mengikuti proses akreditasi menunjukkan komitmen dari RSUD Kecamatan Mandau untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan lingkungan pelayanan yang aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit.

### **2.1.7 Manajemen Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan menggambarkan inti proses pelayanan rumah sakit yang merupakan pengelolaan pelayanan tiap unit yang ada di RSUD Kecamatan Mandau terhadap pasien mulai masuk sampai keluar dari

rumah sakit. Rumah sakit menetapkan alur pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap dan pelayanan penunjang lainnya. Rumah sakit juga menetapkan jenis pelayanan, struktur organisasi unit, kriteria tenaga dan kompetensi, persyaratan umum dan persyaratan khusus sarana dan prasarana termasuk sarana penunjang, memiliki program pelatihan, serta memiliki standar prosedur operasional (SPO), standar peralatan dan standar tata ruang dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 36 mengamanatkan “seluruh rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik yang baik” yang diatur dalam *Hospital by Laws* dan *Medical staf by Laws*. Peraturan Internal rumah sakit (*hospital by laws*) mengatur perbuatan para pihak rumah sakit, pemilik atau yang mewakili dengan pengelola/direktur dan staf medis. Sedangkan tata kelola klinik mengatur agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Komite medis dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada RSUD Kecamatan Mandau adalah 187 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap 26 orang, Tenaga Kerja Sukarela sebanyak 497 orang, dengan jumlah keseluruhan 710 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada RSUD Kecamatan Mandau dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau  
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Esselon IIIa	1	0	1
2.	Esselon IIIb	1	3	4
3.	Esselon Iva	3	6	9
4.	Fungsional Tertentu(Ahli dan Terampil)	20	138	158
5.	Fungsional Pelaksana (Staff)	2	13	15
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>160</b>	<b>187</b>

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian RSUD Mandau, Februari 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 187 orang PNS dilingkungan RSUD Kecamatan Mandau, 27 orang (14,5%) adalah laki-laki dan 160 orang (85,5%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 158 orang PNS (84,5%) RSUD Kecamatan Mandau bekerja pada Jabatan Fungsional Tertentu dan 14 Orang PNS (7,5) Jabatan Eselon serta sisanya sejumlah 15 orang PNS (8%) merupakan pegawai Pelaksana pada RSUD Kecamatan Mandau. Komposisi pegawai sebagian besar di RSUD Kecamatan Mandau adalah Fungsional tertentu yaitu Fungsional tertentu bidang Kesehatan seperti Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan tenaga Kesehatan penunjang lainnya.

Tabel 2.2  
Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau  
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	DIREKTUR	0	0	0	1	1
2	BAG. TATA USAHA	0	0	34	0	34
3	BID. PELAYANAN	0	1	84	13	78
4.	BID. KEPERAWATAN	0	10	56	6	72
5.	BID. HUMAS DAN PENGEMBANGAN SDM	0	0	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>156</b>	<b>21</b>	<b>187</b>

Sumber: Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian RSUD Mandau, Februari 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan RSUD Kecamatan Mandau sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 156 orang atau 83 %, sedangkan Golongan II dan IV hanya sejumlah 32 orang atau 17 %. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3  
Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau  
Menurut Jabatan/Eselon

NO	Unit Kerja	ESELON		
		II	III	IV
1.	Direktur	0	1	0
2.	Bagian Tata Usaha	0	1	3
3.	Bidang Pelayanan	0	1	2
4.	Bidang Keperawatan	0	1	2
5.	Bidang Humas dan Pengembangan SDM	0	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian RSUD Mandau, Februari 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan RSUD Kecamatan Mandau yang menduduki Jabatan Eselon sebanyak 14 Orang PNS. Dari jumlah tersebut 5 PNS menduduki Eselon III dan Sisanya Eselon IV.

Tabel 2.4  
Komposisi PNS RSUD Kecamatan Mandau  
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	DIREKTUR	1				
2	BAG. TATA USAHA	2	28	3	1	
3	BID. PELAYANAN	28	22	28	1	0
4.	BID. KEPERAWATAN	0	26	45	2	0
5.	BID. HUMAS & PENGEMBANGAN SDM	0	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian RSUD Mandau, Februari 2021

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Tenaga Kesehatan RSUD Kecamatan Mandau**  
**Menurut Jenis Profesinya**

<b>NO</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	DOKTER UMUM	23
2	DOKTER SP PENYAKIT DALAM	4
3	DOKTER SP ANAK	3
4	DOKTER SP BEDAH	3
5	DOKTER SP OBGYN	3
6	DOKTER ANESTESI	2
7	DOKTER SP PATOLOGI KLINIK	1
8	DOKTER SP RADIOLOGI	2
9	DOKTER PATOLOGI ANATOMI	1
10	DOKTER SP THT-KL	2
11	DOKTER SP PENYAKIT KELAMIN	1
12	DOKTER SP MATA	2
13	DOKTER SP SARAF	3
14	DOKTER SP BEDAH DIGESTIF	1
15	DOKYER SP BEDAH ONKOLOGI	1
16	DOKTER SP PARU	2
17	DOKTER SP ORTODONTI	1
18	DOKTER SP FISIOTERAPI	1
19	DOKTER SP KEJIWAAN	1
20	DOKTER SP JANTUNG	1
21	DOKTER SP MIKROBIOLOGI	1
22	DOKTER SP BEDAH SARAF	1
23	DOKTER GIGI	9
24	SII KESMAS	1
25	SI KEPERAWATAN	44
26	DIV KEPERAWATAN	1
27	DIII KEPERAWATAN	114
28	DII ANESTESI	1
29	DIV KEPERAWATAN GIGI	1
30	DIII KEPERAWATAN GIGI	3

31	DIII REFRAKSIONIS	3
32	DIV KEBIDANAN	19
33	DIII KEBIDANAN	95
34	SI APOTEKER	11
35	SI FARMASI	2
36	DIII FARMASI & MAKANAN	10
37	DIII FARMASI	16
38	SI KESMAS	29
39	DIII SANITARIAN	2
40	DIII K3	1
41	S2 GIZI	1
42	SI GIZI	3
43	DIII GIZI	7
44	DIII FISIO TERAPI	9
45	DIII OKUPASI TERAPIS	1
46	SI ANALIS	2
47	DIII ANALIS	20
48	SMAK	1
49	SI FISIKA	1
50	DIII TEKNIK RADIOLOGI	11
51	DIII PEREKAM MEDIS	13
52	DIII ELEKTROMEDIK	1
	<b>Total</b>	<b>492</b>

### 2.2.2. Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) yang menjadi aset rumah sakit juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian aset yang dimiliki RSUD Kecamatan Mandau:

Tabel 2.6.  
Daftar aset yang dimiliki oleh RSUD Kecamatan Mandau

Jenis Aset	Kondisi			Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Berat	
<b>GEDUNG</b>				
Umum	1			1
Rumah Dinas Type 70	6			6
Rumah Dinas Type 55	5			5
Masjid	1			1
Gedung Jenazah	1			1
<b>TANAH</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>KETERSEDIAAAN SARANA PELAYANAN</b>				
<b>PENUNJANG MEDIK RS</b>				
Instalasi Radiologi	1			1
Instalasi Laboratorium	1			1
Instalasi Rehabilitasi Medik	1			1
Instalasi Farmasi	1			1
Unit Hemodialisa	1			1
Instalasi Radiodiagnostik	1			1
Instalasi Pemulasaran Jenazah	1			1
Instalasi Patologi Klinik	1			1
<b>AREA PENUNJANG UMUM DAN ADMINISTRASI RS</b>				
Ruangan Bagian Tata Usaha	8			8
Ruang Direksi	1			1
Ruang Sekretaris Direksi	1			1
Ruang Komite Medis	1			1
Ruang Rapat dan Diskusi	1			1
Ruang Bagian SDM	3			3
Ruang SPI	1			1
Ruang Arsip/ <i>File</i>	1			1
Ruang tunggu	1			1
Dapur/ <i>Pantry</i>	1			1
Toilet	1			1
Ruang Rekam Medik	1			1
Ruang Bidang Pelayanan Medis Beserta Seksi-seksinya	3			3
Ruang Bidang Keperawatan Beserta Seksi-seksinya	3			3

Ruang Bagian Pendidikan dan Pelatihan Beserta Seksi-seksinya	3			3
<i>Janitor</i>	1			1
<b>PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN</b>				
Pelayanan Gawat Darurat	1			1
Pelayanan Rawat Jalan	1			1
Pelayanan Rawat Inap	1			1
Pelayanan Bedah Sentral (OK)	1			1
Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1			1
Pelayanan Rawat Intensif (ICU)	1			1
Pelayanan Neonatus (Bayi)	1			1
<b>PENUNJANG NON MEDIK RS</b>				
Instalasi Pencucian Linen/ <i>Laundry</i>	1		1	2
Instalasi Pemeliharaan Sarana ( <i>Workshop</i> )	1			1
Instalasi Sterilisasi Pusat/CSSD	0			0
Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik	1		1	2
Instalasi Sanitasi	1			1
<b>PRASARANA</b>				
<b>SUMBER LISTRIK</b>				
Listrik PLN	1			1
<i>Genset</i>	2			2
UPS	6			6
<b>SUMBER AIR</b>				
PDAM	1			1
Sumur Dangkal	1			1
<b>PENGELOLAHAN LIMBAH</b>				
Limbah Padat			1	1
Limbah Cair	1			1
TPS Limbah B3/infeksius Berijin	0			0
<b>GAS MEDIK &amp; VAKUM MEDIK</b>				
Sentral	4			4
Tabung	23			23
<b>LIFT</b>				
Bed <i>Lift</i>	0			0

<i>Lift</i> Penumpang	4			4
<b>PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN</b>				
APAR	53			53
Hidran	18			18
<b>SISTEM TELEKOMUNIKASI</b>				
Sambungan Saluran Telepon (SST)	1			1
<i>Private Automatic baranch Xchange</i> (PABX)	1			1
Jaringan Internet	1			1
<b>BOILER</b>				
<i>Boiler</i>	1			1
<b>AMBULANCE</b>				
<i>Ambulance</i> Transport	3			3
<i>Ambulance</i> Gawat Darurat	2			2
Mobil/Kereta Jenazah	1			1
<b>ALAT KESEHATAN</b>	<b>1017</b>	<b>794</b>	<b>854</b>	<b>2665</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>1209</b>	<b>794</b>	<b>854</b>	<b>2857</b>

Sumber: Data ASPAK RSUD Kecamatan Mandau, Desember 2020.

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh RSUD Kecamatan Mandau berupa tanah dan bangunan beserta Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang ada di RSUD Kecamatan Mandau. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 2857 jumlah aset di lingkungan RSUD Kecamatan Mandau. Dari total tersebut, 2003 memiliki kondisi yang baik dan sedang dengan persentase 70.10%, selain itu terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 854 item dengan persentase 29.89%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan RSUD Kecamatan Mandau di tahun-tahun berikutnya.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Untuk memberikan menilai secara menyeluruh mengenai kinerja RSUD Kecamatan Mandau, maka dilakukan pengukuran kinerja menggunakan metode *Balanced Scorecard* dengan pendekatan 4 (empat) perspektif yaitu meliputi perspektif pelanggan/*customer*, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal (PBI) dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (PP).

### 2.3.1 Perspektif Pelanggan/*Customer*

Indikator Pelayanan Publik di rumah sakit mengukur tingkat efektifitas dan tingkat efisisensi pengelolaan rumah sakit. Perspektif Pelanggan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang aman, informatif, hemat, bermutu, manusiawi dan memuaskan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta menumbuhkan citra positif rumah sakit di mata masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menilai perspektif pelanggan meliputi *customer acquisition*, *customer loyalty*, *number of complain*, indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan jumlah pasien rujukan.

Tabel 2.7  
Rincian Capaian Kinerja Perspektif Pelanggan  
Di RSUD Kecamatan Mandau

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Customer Acquitition</i>	Orang	29426	22325	23756	25625	18795
	%	27,16	23,18	23,22	18,76	17.85
<i>Customer Loyalty</i>	Orang	78900	73968	78522	110945	86484
	%	72,83	76,81	76,77	81,23	82.14
Total Kunjungan	Orang	108326	96293	102278	136570	105279
<i>Number of Complain</i>	-	-	-	20	28	22

	-	-	-	0.01	0.02	0.02
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	96.3	95,9	95.3
Jumlah Pasien Rujukan	Rujukan	8962	9689	9771	19434	43752
	%	94%	90%	91%	91%	93%

*b*

Sumber: Data Sub Bagian Rekam Medik dan Sub Bagian Humas, 2016-2020.

*Customer acquisition* adalah proses untuk mendatangkan *customer* atau klien baru, data ini merupakan pengukuran tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru yang menggunakan jasa layanannya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase kunjungan pasien baru dibandingkan total kunjungan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Penurunan jumlah kunjungan pasien pada tahun 2017 disebabkan oleh transformasi jaminan sosial menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, sedangkan penurunan jumlah kunjungan pasien pada tahun 2020 disebabkan oleh timbulnya pandemi *Covid-19*.

*Customer loyalty* merupakan indikator dimana RSUD Kecamatan Mandau dapat mempertahankan hubungannya dengan konsumen (loyalitas) yaitu berupa kunjungan ulang. Bila dibandingkan persentase kunjungan ulang pasien jumlahnya cenderung sama setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas terhadap jasa layanan kesehatan yang telah diberikan oleh pemberi layanan kesehatan di RSUD Kecamatan Mandau. Jumlah total kunjungan pasien dari tahun ke tahun di RSUD Kecamatan Mandau cenderung sama, kecuali di tahun 2017. Penurunan jumlah kunjungan pasien di tahun 2017 disebabkan oleh adanya transformasi jaminan sosial menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Permasalahan penggunaan BPJS Kesehatan salah satunya terkait soal administrasi yang rumit. Mengatasi pengaruh transformasi jaminan sosial tersebut terhadap kunjungan pasien di RSUD Kecamatan Mandau, maka perlu dibuat rencana strategis yang tepat agar jumlah kunjungan ke RSUD Kecamatan Mandau tetap meningkat setiap tahunnya, sehingga meningkatkan peluang *Customer acquisition* dan *Customer loyalty*.

*Number of Complain* dihitung dari komplain atau pengaduan yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung (kotak saran, *website*, media sosial facebook, lapor.go.id, maupun di media masa). Unit pengaduan yang berada di Humas merekap data pengaduan berdasarkan proses penanganan langsung/tidak langsungnya. Tindak lanjut dari pengaduan merupakan penyelesaian pada saat itu, jangka menengah maupun jangka panjang. Pada tahun 2016 dan 2017 belum dilaksanakan rekapitulasi keluhan pasien, sedangkan pada tahun 2018 s/d 2020 persentase keluhan hanya 0,02 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian layanan kesehatan di RSUD Kecamatan Mandau yang diberikan telah baik. Sebagian besar keluhan pasien terkait pelayanan.

IKM berfungsi untuk menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik. Pengukuran IKM pada tahun 2016 dan 2017 diperoleh dari penilaian ISO 9001-2008 yang diselenggarakan oleh bagian organisasi Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, sedangkan IKM tahun 2018 s.d. 2020 pengukuran dilakukan oleh bagian hubungan masyarakat (HUMAS) RSUD Kecamatan Mandau. Selama 5 (lima) tahun tersebut dapat disimpulkan nilai IKM di RSUD Kecamatan Mandau relatif meningkat yaitu dengan nilai berkisar dari **85 - 95 (Sangat Baik)**.

Persentase jumlah pasien rujukan cenderung sama setiap tahunnya, kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pasien RSUD Kecamatan Mandau adalah kasus rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau faskes tingkat 1 (satu) di Kecamatan Mandau. Persentase jumlah kunjungan pasien umum  $\leq 10\%$ , hal ini dipengaruhi oleh penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang berimplikasi padapemanfaatan jaminan pelayanan kesehatan oleh sebagian besar masyarakat.

Tabel 2.8  
Cakupan Kunjungan Pasien di unit layanan RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rawat Jalan	Orang	101017	84023	85782	142473	95819
2	Rawat Inap	Orang	1745	7218	7079	9640	6893
3	Instalasi Gawat Darurat	Orang	13492	10277	11449	14737	7376
4	Pembedahan	Tindakan	1708	1816	1946	2242	1699
5	Radiologi	Jenis	8510	9308	11188	14446	12447
6	Patologi Klinik	Jenis	39053	31017	33156	44476	35403
7	Patologi Anatomi	Jenis	150	432	963	1.128	1.372
8	Farmasi	Resep	459671	387149	461988	672810	544031
9	Hemodialisa	Tindakan	0	0	0	463	1618
10	Persalinan	Tindakan	1322	994	924	1024	702
13	Fisioterapi	Tindakan	28251	27314	27036	29980	14185
12	Transfusi	Tindakan	2002	2655	3318	3913	3117
13	Pemulasaran Jenazah	Tindakan	96	132	140	504	708

*Sumber: Data Sub Bagian Rekam Medik, 2016-2020.*

Pada tabel di atas terlihat bahwa penurunan total kunjungan pasien pada tahun 2017 dan 2020 disumbang oleh berkurangnya jumlah kunjungan pasien hampir di setiap unit layanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penyebab kondisi ini adalah adanya transformasi jaminan sosial dan pandemi *Covid-19*. Hal ini perlu diantisipasi pengaruhnya terhadap penerimaan pendapatan yang juga akan berpengaruh pada biaya operasional rumah sakit. Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Kecamatan Mandau terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, melalui pemenuhan sumber daya kesehatan. Tujuannya adalah agar meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

Sejak tahun 2014 RSUD Kecamatan Mandau telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 529 Tahun 2014. Sebagai RSUD yang telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD), untuk meningkatkan pendapatannya RSUD Kecamatan Mandau berusaha mengembangkan beberapa layanan unggulan, diantaranya layanan unggulan poliklinik. Hemodialisa Layanan unggulan di RSUD Kecamatan Mandau telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 444/DISKES-YANKES/192 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau.

### 2.3.2. Perspektif Keuangan

Perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercapai profitabilitas yang memadai guna membiayai kegiatan operasional dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja internal RSUD Kecamatan Mandau. Indikator yang digunakan untuk perspektif keuangan meliputi *Sales Growth Rate (SGR)*, *Cost Recovery Rate (CRR)*, *Tingkat Kemandirian*, *Current Ratio*, *Cash Ratio*.

Tabel 2.9  
Realisasi Target Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Belanja	Capaian Target Belanja
2016	25,000,000,000	15,540,198,978	62.16	15,317,175,652	61.27
2017	47,800,000,000	24,488,259,491	51.23	24,529,583,739.94	51.32
2018	37,000,000,000	40,467,023,184	109.37	36,145,007,223.94	97.69
2019	55,000,000,000	33,593,536,757	61.08	37,623,034,492.68	68.41
2020	55,000,000,000	53,935,965,714	98.07	51,880,351,716,00	94.33

Sumber: Data Sub Bagian Pembukuan Keuangan, 2016-2020.

Sejak tahun 2014 mulai dilaksanakan PPK-BLUD di RSUD Kecamatan Mandau, sehingga diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan. Penerimaan pendapatan kas setiap tahun mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Ketercapaian target keuangan dalam 5 (lima) tahun periode 2016-2020 terlihat pada tahun 2018 dan 2020, namun perlu diperhatikan

penetapan besaran target harus dihitung secara rasional. Kenaikan penerimaan pendapatan yang signifikan pada tahun 2018 diperoleh dari piutang Jamkesmasda tahun 2016, sedangkan peningkatan penerimaan pendapatan tahun 2020 diperoleh dari layanan pasien *Covid-19*. Pada tahun 2016, 2017 dan 2019 capaian target penerimaan pendapatan <80%, sehingga ke depan perlu diperhatikan secara cermat penghitungan penetapan target agar dapat mengoptimalkan pelayanan yang ada.

Capaian target belanja pada RBA setiap tahun hampir mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah sesuai dengan pelaksanaan RBA. Untuk mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan BLUD akan terlihat dalam target capaian kinerja pelayanan dan SPM sebagai output sasaran target kinerja BLUD.

Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisa laporan Keuangan yang disajikan:

Tabel 2.10  
Analisa Laporan Keuangan RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Hasil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Sales Growth Rate (SGR)</i>	-7.61	57.58	65.25	-16.99	60.55
2	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	16.56	23.07	34.86	29,76	43.68
3	<i>Cash Ratio (Rasio Kas)</i>	9.78	1.39	3.86	2,35	22.27
4	<i>Current Ratio ( Rasio Lancar)</i>	7.38	0.81	4.31	3.79	65.06

Sumber: Data Sub Bagian Pembukuan Keuangan, 2016-2020

Tabel diatas memberikan informasi terkait perspektif keuangan di RSUD Kecamatan Mandau pada tahun 2016-2020 antara lain:

- a. Tingkat pertumbuhan pendapatan fungsional atau *Sales Growth Rate (SGR)* selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. SGR tahun 2016, 2017 dan 2019 mengalami penurunan, sehingga secara kuantitas pendapatan rumah sakit juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018 SGR mengalami peningkatan

yang sangat signifikan disebabkan oleh penerimaan pendapatan dari piutang Jamkesda tahun 2016 dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi dikarenakan penerimaan dari jasa layanan pasien *Covid-19*.

- b. Tanpa mengandalkan subsidi APBD rata-rata persentase *Cost Recovery Rate (CRR)* pada tahun 2016-2020 adalah 29.58%, artinya rumah sakit masih belum mampu membiayai kegiatan operasionalnya secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan diiringi peningkatan belanja operasional, sehingga RSUD Kecamatan Mandau masih memerlukan subsidi dari APBD untuk belanja operasional.
- c. Tingkat kemandirian menggambarkan sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional mampu membiayai belanjanya termasuk belanja modal dan gaji pegawai PNS. Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemandirian RSUD Kecamatan Mandau masih kurang baik ( $CRR < 60\%$ ).
- d. *Cash Ratio* yang dimiliki rumah sakit selama periode (2016-2020) adalah rata-rata 7.93 dapat diartikan bahwa kemampuan kas rumah sakit dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya selalu mengalami peningkatan/penurunan.
- e. *Current Ratio* yang dimiliki rata-rata 16.27, berarti aset lancar yang dimiliki rumah sakit mampu membayar kewajiban lancar. Secara keseluruhan aset yang dimiliki rumah sakit sangat mampu memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sewaktu-waktu kegiatan operasional dihentikan.

### **2.3.3. Perspektif Proses Bisnis Internal (PBI)**

Tujuan perspektif proses bisnis internal ini untuk menjadikan rumah sakit berbasis kinerja dengan standar pelayanan yang berfokus pada customer dengan meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan. Dalam perspektif ini akan diukur kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit

baik kualitas tempat maupun mutu pelayanan. Kualitas tempat diukur dari pemanfaatan tempat tidur yang juga menggambarkan tingkat efisiensi rumah sakit. Sedangkan mutu menggambarkan kualitas pelayanan/tindakan yang diberikan kepada pasien. Beberapa indikator untuk menilai perspektif bisnis internal adalah kualitas mutu layanan, kualitas tempat layanan, capaian standar pelayanan minimal (SPM), capaian fungsi sebagai wahana pendidikan dan Pengembangan SIM RS. Masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kualitas Mutu Layanan

Kualitas mutu layanan terlihat dari standar mutu yang diterapkan di RSUD Kecamatan Mandau. Saat ini standar mutu yang telah dilaksanakan dan menjadi budaya kerja di RSUD Kecamatan Mandau yaitu standar akreditasi rumah sakit, capaian akreditasi di RSUD Kecamatan Mandau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11  
Capaian Akreditasi RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2016-2021

Tahun	Status Akreditasi
2016	Akreditasi Utama
2017	Akreditasi Utama
2018	Akreditasi Utama
2019	Akreditasi Madya
2020	Akreditasi Madya

Sumber: Sumber: Data Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, 2016-2020

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka setiap rumah sakit di Indonesia diwajibkan terakreditasi. Indikator ini dinilai dari pencapaian akreditasi Rumah Sakit. Sejak tahun 2016

RSUD Kecamatan Mandau telah memperoleh capaian akreditasi tingkat Utama, hasil penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Agar kinerja staf tidak kembali ke budaya lama serta sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, manajemen secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi standar prosedur operasional (SPO), program kerja, pedoman pengorganisasian, panduan pelayanan dan melakukan evaluasi kinerja di masing-masing unit lingkup RSUD Kecamatan Mandau.

Di Tahun 2020, RSUD Kecamatan Mandau mendapatkan perpanjangan peringkat akreditasi Madya oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit. Penurunan tingkat akreditasi tersebut tentu menjadi acuan bagi RSUD Kecamatan Mandau untuk terus meningkatkan pelaksanaan akreditasi dengan tujuan untuk mencapai akreditasi Paripurna dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kualitas Tempat Layanan

Tabel 2.12  
Kualitas Tempat layanan RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Standar
Jumlah TT	171	171	214	210	187	200
BOR (%)	48,7	58,5	74	81	65	70-85%
ALOS (Hari)	3,3	3,3	3	3	3	6-9 hari
BTO (Kali)	48,3	39	31	40	40	40-50 kali
TOI (Hari)	3,88	3,9	3	5	5	1-3 hari
NDR	12,9	26,2	31	20	20	< 25 ‰
GDR	32,7	50,7	56	35	35	< 45 ‰

Sumber: Data Sub Bagian Rekam Medik, 2016-2020.

RSUD Kecamatan Mandau saat ini sedang meningkatkan jumlah tempat tidur dan sampai saat ini jumlah tempat tidur

sebanyak 187. Pelayanan rawat inap paling banyak membutuhkan sumber daya manusia, baik tenaga perawat (terdiri dari 3 *shift* + *shift* libur dan *shift* lepas), dokter, tenaga administrasi, dll. Tabel di atas menunjukkan bahwa BOR RSUD Kec. Mandau mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 s/d 2020 adanya peningkatan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan diberlakukannya jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sangat mempengaruhi jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit. Alur pelayanan berjenjang dalam pelayanan pasien, dianggap terlalu rumit bagi peserta BPJS Kesehatan. Contohnya saja untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit, sebelumnya peserta wajib terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu kebijakan Kementerian Kesehatan terkait pandemi *Covid-19* di tahun 2020 yang menghimbau agar rumah sakit mengurangi layanan praktik rutin, diperkirakan juga mempengaruhi rendahnya jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit yang berdampak pada penurunan nilai BOR.

ALOS RSUD Kecamatan Mandau dari tahun 2016-2020 berada di rentang angka ideal menurut Barber-Johnson. Dibandingkan dengan target Nasional, ALOS RSUD Kecamatan Mandau memang sangat rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan pola penyakit yang ditangani oleh RSUD Kecamatan Mandau, dimana penyakit-penyakit tersebut memang tidak memerlukan perawatan yang lebih lama. RSUD Kecamatan Mandau juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelayanan rawat inap melalui penambahan sarana dan prasarana, penerapan SPO pelayanan serta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan BTO dan TOI RSUD Kecamatan Mandau nilainya tiap tahunnya tidak terlalu jauh perbedaannya.

Tampak bahwa NDR dan GDR dari tahun ke tahun nilainya berfluktuasi, namun masih dapat ditolerir karena berada di bawah angka ideal yaitu <25 per 1000 penderita keluar untuk NDR dan untuk GDR <45 per 1000 penderita keluar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD Kecamatan Mandau sudah baik tetapi tetap harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pasien pre dan post perawatan di rumah sakit sudah cukup baik, sehingga angka kematian dapat dikurangi dan tentu saja ini tidak terlepas daribaliknya kualitas SDM, dukungan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta manajemen yang ada.

c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Kecamatan Mandau kepada masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran kinerja pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau.

Tabel 2.13  
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2019-2020

NO	Indikator Kinerja	Target	Capaian		
			2018	2019	2020
<b>IGD</b>					
1	Kemampuan Menangani life saving anak dan dewasa.	100%	0	72%	80%
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam	24 Jam	0	24 jam	24 jam
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS / PPGD / GELS / ALS	100 %	0	71%	75%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	0	Satu Tim	Satu Tim
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	0	4 menit	4 menit
6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	0	70%	70%
7	Kematian pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0	0	0
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %		100%	100%

<b>RAWAT JALAN</b>					
1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	0	100%	100%
2	Ketersediaan Pelayanan	Klinik Anak, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan, Klinik Bedah	0	Tersedia	Tersedia
3	Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 - 11.00	0	100%	100%
4	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	0	72 menit	80 menit
5	Kepuasan Pelanggan	> 90 %	0	91.08%	95%
6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	0	100%	83%
7	Terlaksananya bagian pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %	0	95%	81%
<b>RAWAT INAP</b>					
1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dr. Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3	0	Tersedia	Tersedia
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	0	100%	100%
3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Kesehatan anak, Penyakit dalam, kebidanan, dan bedah	0	Tersedia	Tersedia

4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	0	100%	100%
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0	0	0
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	0	0	0
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100 %	0	100%	100%
8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0	0.04%	0
9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	0	0.01%	0
10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	0	90.66%	96%
11	Rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	≥ 60 %	0	100%	100%
	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB				
	Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	0	100%	100%
<b>BEDAH SENTRAL</b>					
1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	0	1 hari	0
2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	0	0	0
3	Tidak adanya kejadian operasi salah insisi	100 %	0	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %	0	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %	0	100%	100%

6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	0	100%	100%
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	0	0	0
<b>PERSALINAN, PERINATOLOGI DAN KB</b>					
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1 %, Pre-eklampsia ≤ 30 %,Sepsis ≤ 0,2 %	0	0	0
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (dokter Sp.OG, Dokter umum terlatih, Bidan)	100%	0	100%	100%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia	0	Tersedia	Tersedia
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An	0	Tersedia	Tersedia
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100 %	0	100%	100%
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	0	63%	64%
7	Keluarga Berencana : Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	100 %	0	100%	100%

8	Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100 %	0	100%	100%
9	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	0	91%	95%
<b>INTENSIF</b>					
1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0	0	0
2	Pemberi pelayanan unit intensif	100 % Dokter spesialis anestesi sesuai dengan kasus yang ditangani, 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)	0	100% 28%	100% 28%
<b>RADIOLOGI</b>					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	0	30 menit	39 menit
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	0	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad
3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	0	0.2 %	0
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	0	92%	99%
<b>LABORATORIUM</b>					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan	≤ 140 menit Kimia	0	56 menit	50 menit

	laboratorium.	darah & darah rutin			
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	0	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100 %	0	100 %	100%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	0	83%	99%
<b>REHABILITASI MEDIK</b>					
1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %	0	8%	4%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	0	100%	100%
3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	0	95%	100%
<b>FARMASI</b>					
1	Waktu tunggu pelayanan : Obat Jadi	≤ 30 menit	0	60 menit	61 menit
	Racikan	≤ 60 menit	0	90 menit	95 menit
2	Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat	100 %	0	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	0	99%	97%
4	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	0	100%	100%
<b>GIZI</b>					
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	0	92%	97%

2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	0	8%	9%
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %	0	100%	100%
<b>TRANSFUSI DARAH</b>					
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	0	95%	96%
2	Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0	0	0,13%
<b>PELAYANAN GAKIN</b>					
1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	0	100%	100%
<b>REKAM MEDIK</b>					
1	Kelengkapan pengisian rekam medik <24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	0	75%	65%
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	0	84%	82%
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	0	7.75 menit	8 menit
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	0	13 menit	14 menit
<b>PENELOLAHAN LIMBAH</b>					
1	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/l, COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l	0	10 mg/ l 77mg/l 19 mg/l	24.75 mg/ l 48 mg/l 25.58 mg/l

		PH 6-9		7 mg/l	6.9 mg/l
2	Pengelolaan Limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	0	53%	100%
<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>					
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	0	100%	100%
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	0	100%	100%
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat (per 6 bulan)	100%	0	100%	100%
4	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	100%	0	100%	100%
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	0	96.79%	8%
6	Cost recovery	≥ 40 %	0	100%	100%
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	0	100%	100%
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	24 jam	0	1,5 jam	1,5 jam
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	≤ 2 jam	0	100%	100%
<b>AMBULANCE/KERETA JENAZAH</b>					
1	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	0	24 jam	24 jam
<b>PEMULASARAN JENAZAH</b>					

1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	0	28 menit	29 menit
<b>PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT</b>					
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	> 80 %	0	90%	86%
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	0	96%	87%
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	0	100%	92%
<b>PELAYANAN LAUNDRI</b>					
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	0	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	0	80%	80%
<b>PELAYANAN INFEKSI</b>					
1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	0	77%	67%
2	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	0	67%	60%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	0	100%	100%
<b>Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>			0	70,45%	82,02%

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase capaian indikator SPM yang memenuhi target di RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2019-2020 rata-rata berkisar 76,24% sehingga perlu upaya pencapaian SPM dengan memenuhi komponen input, proses maupun output yang harus dicapai. Nilai SPM menggambarkan kualitas pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau. Kinerja pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau masih harus ditingkatkan atau perlu dikaji kembali ketepatan penetapan nilai target semua indikator dan apakah setiap indikator telah di survei dengan benar.

d. Capaian Fungsi Sebagai Wahana Pendidikan

Selain jasa pelayanan kesehatan, salah satu pendapatan RSUD Kecamatan Mandau berasal dari fungsi rumah sakit sebagai wahana pendidikan. Dengan adanya MoU antara rumah sakit dan institusi pendidikan, maka rumah sakit memperoleh biaya magang/praktik/penelitian sesuai dengan perbup tarif yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian fungsi RSUD Kecamatan Mandau sebagai wahana pendidikan:

**Table 2.14**  
**Capaian Fungsi RSUD Kecamatan Mandau sebagai Wahana Pendidikan**  
**Tahun 2016-2021**

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rekapitulasi Data MOU bidang pendidikan	PT	2	3	2	5	
Rekapitulasi Jumlah Siswa yang melaksanakan praktek kerja	Kunjungan B/L Siswa/ Mahasiswa	0	73	17	70	14

Rekapitulasi Jumlah Siswa/Mahasiswa yang melaksanakan penelitian	Kunjungan B/L Siswa/Mahasiswa	0	36	40	0	44
------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---	----	----	---	----

Sumber: Data Sub Bagian Humas dan SDM 2016-2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah MoU pendidikan dan jumlah mahasiswa yang melaksanakan praktik lapangan di RSUD Kecamatan Mandau. RSUD Kecamatan Mandau perlu menerapkan standarisasi integrasi pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar akreditasi. Selain dengan lembaga pendidikan RSUD Kecamatan Mandau juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak lainnya yang juga menambah pendapatan RSUD Kecamatan Mandau selain dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan dan wahana pendidikan.

#### e. Pengembangan SIM RS

RSUD Kecamatan Mandau telah berhasil mengembangkan sistem komputer terintegrasi, sehingga jumlah unit layanan yang terintegrasi SIM RS pada tahun 2020 mencapai 80%. SIM RS terintegrasi disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari antrian, pendaftaran online, pendaftaran rawat jalan, pendaftaran igd, pendaftaran rawat inap, farmasi, *medical check up* (MCU), *billing/ijp*, rekam medik, *assembling*, radiologi, fisioterapi, hemodialisa, laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, kasir, unit tranfusi darah rumah sakit (UTDRS) sampai ke instalasi gizi. Sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwasetiap rumah sakit wajib, Fisioterapi, Hemodialisa, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Kasir, Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS) sampai ke Instalasi Gizi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan memiliki suatu sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS).

**Tabel 2.15**  
**Capaian Pengembangan SIM RS**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Capaian
2016	50%
2017	65%
2018	75%
2019	80%
2020	80%

*Sumber: Data Sub Bagian Rekam Medik, 2016-2020.*

Sejak tahun 2014 SIM RS sudah mulai terintegrasi dengan instalasi/ruang/unit pelayanan yang ada di RSUD Kecamatan Mandau. SIM RS yang terkomputerisasi dengan menggunakan software dari pihak ketiga akhirnya dapat dilaksanakan, meskipun penerapannya belum meliputi seluruh kegiatan di RSUD Kecamatan Mandau. Hal ini disebabkan SIM RS yang ada sebatas menyediakan modul SIM RS untuk Front Office. Kedepannya direncanakan kekurangan tersebut akan dipenuhi. Untuk informasi yang belum terkomputerisasi, tetap dilakukan secara manual.

#### **2.3.4 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (PP)**

Perspektif ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia rumah sakit yang profesional, *akuntable*, dan berorientasi kepada pelanggan melalui peningkatan persepsi dan komitmen dalam pelayanan dengan mengembangkan dan memperbaiki tata kelola SDM di internal baik dari segi kemampuan teknis, mental, psikologis melalui diklat internal maupun eksternal. Indikator yang diukur meliputi standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan disiplin kerja. Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Standar Kompetensi**

Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi dilihat dari Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan profesinya selama tahun 2020.

Tabel 2.16  
Capaian Standar Kompetensi di RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2016-2021

Tahun	% Capaian
2016	90%
2017	95%
2018	98%
2019	98%
2020	95%

Sumber: Data Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, 2016-2020.

Dari tabel di atas tampak bahwa rata-rata capaian indikator standar kompetensi dari tahun 2016 s.d. 2020 mencapai 95,20%. Persentase capaian tahun 2019 dan 2020 belum 100%, hal ini disebabkan beberapa orang tenaga kesehatan SIK/SIP-nya masih dalam proses pengurusan.

#### b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Indikator pendidikan dan pelatihan (Diklat) dilihat dari data pegawai yang mengikuti pelatihan selama tahun 2016-2021, menggunakan dana APBD dan BLUD.

Tabel 2.17  
Capaian Diklat Pegawai di RSUD Kecamatan Mandau  
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	% Diklat per Tahun
2016	0	1.213	0
2017	0	135	0
2018	410	83	20.24
2019	482	109	22.61
2020	526	40	7.6

Sumber: Data Sub Bagian Humas dan SDM 2016-2020

Kesimpulan dari tabel diatas adalah jumlah pegawai yang mengikuti diklat berfluktuasi setiap tahun. Tuntutan kebutuhan peningkatan profesionalisme SDM sangat mutlak dipenuhi sebagai salah satu kunci keberhasilan kinerja rumah sakit dalam memenangkan persaingan. Metode In-

House training dianggap lebih efisien karena dapat mengikutsertakan lebih banyak pegawai sebagai peserta, tetapi tidak semua jenis pelatihan dapat terlaksana dengan metode ini.

c. Disiplin Kerja

Indikator disiplin kerja dilihat dari persentase pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai RSUD Kec. Mandau sejak tahun 2016-2021.

Tabel 2.18  
Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin PNS di RSUD Kec. Mandau  
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS (orang)	Jumlah Total PNS	Persentase
2016	0	190	0
2017	0	194	0
2018	0	195	0
2019	0	186	0
2020	0	184	0

Sumber: Data Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, 2016-2020

Dari data menunjukkan bahwa persentase pegawai yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016-2021 masih 0%.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target kinerja RENSTRA RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 2.9. berikut ini:

**Tabel 2.19**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau**  
**Kabupaten Bengkalis**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-(%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Indeks kepuasan pelanggan	%				83	85	87	90	92	82,35	82,35	84,00	90,49	95,28	99,22	96,88	96,55	100,54	103,57
Persentase pengadaan dan peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai perencanaan	%				100	100	100	100	100	80,56	80,56	100	100	100	80,56	80,56	100	100	100
Persentase ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bed Occupancy Rate (BOR)	%				62	68	70	78	80	61,70	58,50	74,00	81,00	65,00	100,33	86,03	105,71	103,85	81,25
Average length of stay (ALOS)	Hari				6	6,5	6,5	7	7	6,20	3,30	3,00	3,00	3,00	103,33	50,77	46,15	42,86	42,86
Bed Turn Over (BTO)	Kali				50	50	50	50	50	54,50	39,00	31,00	43,00	40,00	109,00	78,00	62,00	86,00	80,00
Penggunaan SIMRS	Ada/Tidak				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase ketersediaan dokumen standar prosedur operasional pelayanan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tahunan rumah sakit	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data Sub Bagian Penyusunan Program RSUD Kecamatan Mandau, Desember 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2016-2020 sebagian besar telah tercapai, khususnya pada tahun 2020. Terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang setiap tahun terukur capaian realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang perlu ditingkatkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau di masa yang akan datang. Mengingat beberapa indikator kinerja sasaran ada yang belum tercapai, maka RSUD Kecamatan Mandau beserta seluruh jajarannya akan terus berupaya. Upaya yang bisa dilakukan RSUD Kecamatan Mandau antara lain melalui optimalisasi kinerja seluruh pihak di lingkup RSUD Kecamatan Mandau mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, selain itu juga meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait.

Ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan kegagalan pencapaian target indikator kinerja untuk beberapa indikator kinerja sasaran. Adapun permasalahan dan solusi yang telah dilakukan antara lain:

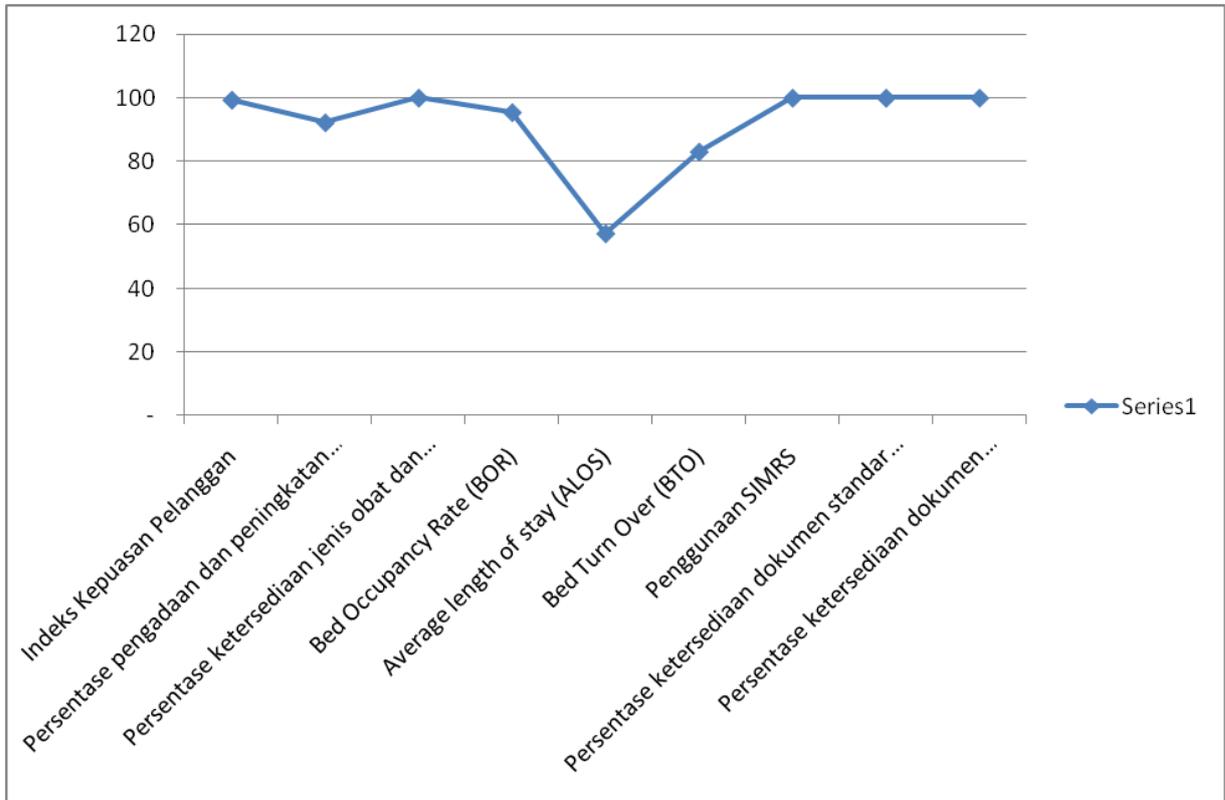
1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai solusi telah dilakukan rekrutmen pegawai dan kerjasama dengan pihak lain untuk melengkapi kekurangan SDM tersebut.
2. Masih sulit mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur RSUD Kecamatan Mandau. Sebagai solusi dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan untuk pengambilan kebijakan. Sebagai solusi direncanakan pada tahun 2021 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan untuk pengambilan kebijakan.

4. Alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan. Sebagai solusinya RSUD Kecamatan Mandau mengusulkan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui dana APBD Provinsi Riau maupun APBN.

Selain permasalahan di atas, pandemi *Covid-19* menambah beban operasional RSUD Kecamatan Mandau karena rumah sakit harus melengkapi sarana prasarana dan peralatan untuk menghadapi serangan pandemi yang terus meningkat, selain itu RSUD Kecamatan Mandau juga harus memikirkan strategi agar akses masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan tidak terhambat akibat pandemi. Pada bulan April 2020, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan agar rumah sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat. Kebijakan ini mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan pasien secara signifikan dan tentu saja pendapatan rumah sakit menurun, pada saat yang bersamaan pengeluaran rumah sakit justru meningkat.

Kinerja RSUD Kecamatan Mandau sudah menunjukkan hasil yang baik, namun kinerja ini masih perlu ditingkatkan agar tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau sebagai perangkat daerah di bidang pelayanan kesehatan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

**Grafik 2.1.**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD KEC. MANDAU**  
**TAHUN 2016 - 2020**



Kinerja RSUD Kecamatan Mandau sudah menunjukkan hasil yang baik, namun kinerja ini masih perlu ditingkatkan agar tugas dan fungsi RSUD Kecamatan sebagai perangkat daerah di bidang pelayanan kesehatan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Disamping mengukur pencapaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran RSUD Kecamatan Mandau sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau**  
**Kabupaten Bengkalis**

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)										Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	18	19
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	5.826.760	6.506.814	6.989.055	7.039.925	5.836.175	5.226.920	5.619.807	5.811.798	6.138.820	5.519.191	89,71	86,37	83,16	87,20	94,57	0,03	1,03
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.433.557	2.413.853	1.905.622	2.483.030	4.381.740	1.452.311	1.870.080	1.812.619	2.225.969	4.223.341	59,68	77,47	95,12	89,65	96,39	14,31	23,9
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	961.600	600.000	342.000	450.000	56.290	684.645	473.861	243.585	414.111	56.290	71,20		71,22	92,02	100	-37,57	-33,6
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					83.800					65.279				77,90		-	-
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.523.410	6.283.533	5.923.965	8.435.441	10.976.900	8.044.499	3.315.372	5.838.585	7.925.597	10.806.421	84,47	52,76	98,56	93,96	98,45	3,53	7,7
6	Program Uapaya Kesehatan Masyarakat	11.411.260	11.239.670	11.995.700	14.450.750	14.706.000	9.871.690	10.002.300	10.558.166	10.993.101	12.691.049	86,51	88,99	88,02	76,07	86,30	5,16	5,2
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	150.000	350.000	244.100	320.655	80.000	73.307	127.229	229.390	230.708	75.248	48,87	36,35	93,97	71,95	94,06	-6,11	0,3
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	150.000	100.000	105.100	50.000	200.000	96.059	18.868	93.196	49.665	198.000	64,04	18,87	88,67	99,33	99,00	8,26	22,4
9	Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	37.653.537	52.753.279	13.981.285	17.773.489	10.803.637	20.128.694	18.664.638	13.587.663	17.014.735	9.327.127	53,46	35,38	97,18	95,73	86,33	-20,19	-13,7
10	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.020.250	900.120	1.002.550	1.400.000	900.000	893.732	704.227	855.815	564.301	764.002	87,60	78,24	85,36	40,31	84,89	-2,30	-3,4
11	Program Peningkatan kualitas pelayanan BLUD	25.000.000	47.800.000	37.000.000	55.000.000	55.000.000	15.317.176	24.529.554	35.815.336	37.623.034	51.880.352	61,27	51,32	96,80	68,41	94,33	13,65	22,1
	<b>TOTAL</b>	<b>94.130.374</b>	<b>128.947.269</b>	<b>79.489.377</b>	<b>107.403.290</b>	<b>103.024.542</b>	<b>61.789.033</b>	<b>65.325.936</b>	<b>74.846.153</b>	<b>83.180.041</b>	<b>95.606.300</b>	<b>65,64</b>	<b>50,66</b>	<b>94,16</b>	<b>77,45</b>	<b>92,80</b>	<b>1,73</b>	<b>8,9</b>

Sumber: Data Sub Bagian Keuangan RSUD Kecamatan Mandau, Desember 2020.

Tabel di atas memberikan data terkait dengan program, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016-2020. Beberapa catatan atas kinerja anggaran RSUD Kecamatan Mandau antara lain adalah:

1. Program yang dilaksanakan RSUD Kecamatan Mandau Rata – rata Pertumbuhan anggaran program selama kurun waktu lima tahun dalam Belanja Langsung dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 1.73% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 8,9%.
2. Rata-rata pertumbuhan anggaran BL dari 11 program terdapat 6 (enam) program yang berkontraksi positif selainnya negatif, sedangkan realisasi BL dari 11 program hanya 7 (tujuh) program yang berkontraksi positif selainnya negatif, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi, sehingga pagu anggaran yang tersedia dialokasikan guna peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Terdapat 11 program dalam 5 (lima) tahun, 10 program dilaksanakan setiap tahun dan 1 program lagi hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4. Program yang dilaksanakan RSUD Kecamatan Mandau merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, perlu disusun perencanaan dan penganggaran tahunan yang lebih akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada Renstra RSUD Kecamatan Mandau dan RPJMD Kabupaten Bengkalis, kemudian melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh bagian dan bidang lingkup RSUD Kecamatan Mandau.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Kecamatan Mandau dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah di masa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi oleh RSUD Kecamatan Mandau dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pelayanan kesehatan, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 3 Th 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) dan masih banyak lagi peraturan lainnya tentang pengelolaan pelayanan di rumah sakit;
2. Tersedianya bantuan dari APBN berupa Dana alokasi khusus (DAK), serta bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD provinsi Riau untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan alkes;
3. Kemajuan teknologi dan peluang KSO untuk pengembangan fasilitas pelayanan berupa sarana, prasana, alat kesehatan dan perlengkapan penunjang, dengan kemajuan teknologi terutama yang berhubungan dengan kedokteran canggih dimana kita sudah dapat melakukan MOU tentang Peralatan Haemodilisa dan Peralatan Laboratorium Kimia, dan lain-lain.

4. Terlaksananya kerjasama dengan institusi pendidikan, pemberi jaminan kesehatan, swasta dan fasilitas kesehatan lainnya.

Adapun tantangan yang dapat dimanfaatkan RSUD Kecamatan Mandau dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar Dinas terkait belum optimal;
2. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Tingginya kecenderungan masyarakat untuk berobat ke negeri seberang;
4. Banyaknya Rumah sakit swasta di wilayah kerja RSUD Kecamatan Mandau, dari data yang kali dapati terdapat Rumah Sakit Swasta Tipe C dua Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Permata Hati dan Rumah Sakit Mutia Sari dan Rumah Sakit Tipe D yaitu RS Thursina dan RS AAD dan RS Pertamina serta Klinik Swasta lainnya
5. *Force Majeure*; hal ini bisa disebabkan karena bencana alam ataupun bencana non alam seperti Pandemi Covid 19
6. Rasionalisasi atau *refocusing* anggaran; salah satunya adalah dampak pandemi Covid-19 yang menambah beban operasional RSUD Mandau. Rumah sakit harus melengkapi sarana prasarana dan peralatan untuk menghadapi serangan pandemi yang terus meningkat, selain itu juga harus memikirkan strategi agar akses masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan tidak terhambat akibat pandemi. Pada bulan April 2020, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan agar Rumah Sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat. Kebijakan ini mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan pasien secara signifikan dan tentu saja pendapatan Rumah Sakit menurun, pada saat yang bersamaan pengeluaran Rumah Sakit justru meningkat. Selain menurunnya pendapatan, dampak pandemi ini juga menyebabkan tidak terlaksana atau tertundanya

beberapa kegiatan akibat Rasionalisasi atau *recofusing* anggaran.

7. Masalah hukum atau tuntutan dari pelanggan rumah sakit.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, RSUD Kecamatan Mandau akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.21

Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Merencanakan pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	√	√	√	√	√	√
2	Melaksanakan kegiatan akreditasi di rumah sakit	√	√	√	√	√	√
3	Peningkatan penyediaan media promosi dan pemasaran	√	√	√	√	√	√
4	Optimalisasi pemenuhan sarana, prasarana dan alkes melalui APBD dan APBN	√	√	√	√	√	√
5	Memaksimalkan fungsi sarana, prasarana dan alkes dengan rehabilitasi, pemeliharaan dan kalibrasi	√	√	√	√	√	√
6	Peningkatan kompetensi SDM dengan melaksanakan <i>in house training</i> dan <i>outhouse training</i> , kursus-kursus singkat, bimtek dan	√	√	√	√	√	√

	metode pelatihan lainnya						
7	Optimalisasi pengelolaan rekam medis rumah sakit dengan sistem terintegrasi	√	√	√	√	√	√
8	Peningkatan tata kelola anggaran pendapatan untuk membiayai operasional rumah sakit	√	√	√	√	√	√

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.



## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

*Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah*

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama RSUD Kecamatan Mandau adalah "**belum terwujudnya pelayanan prima**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan belum mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

#### **1. Pengelolaan pelayanan belum optimal**

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan kesehatan.

#### **2. Sarana, prasarana dan alkes belum terpenuhi sesuai standar**

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa:

- a. Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes belum optimal.

#### **3. Pengelolaan SDM belum optimal**

Permasalahan ini dapat dilihat dari:

- a. Perlunya peningkatan kompetensi SDM terutama terkait layanan unggulan;

- b. Sistem *reward* dan *punishment* belum terlaksana dengan baik;
  - c. Belum sinkronnya rencana pengembangan SDM di bagian diklat dengan anggaran yang tersedia;
  - d. Penempatan SDM yang belum sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan.
4. Pengelolaan promosi dan pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih belum optimal.

Permasalahan ini dapat dilihat dari:

Masih kurangnya promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih

5. Pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit belum optimal.

Permasalahan ini dapat dilihat dari:

Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SIM RS

6. Tata kelola keuangan PPK-BLUD belum optimal

Permasalahan ini dapat dilihat dari:

- a. Kebijakan terkait implementasi PPK BLUD Masih kurang
- b. Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD
- c. Sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam penatausahaan keuangan walaupun sudah mencukupi namun belum semua memahami prinsip PPK BLUD;
- d. Masih adanya keterlambatan penyampaian RBA.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan RSUD Kecamatan Mandau lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.  
 Kerangka Permasalahan Pelayanan  
 RSUD Kecamatan Mandau



Pelayanan prima di rumah sakit adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh karyawan/petugas rumah sakit untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pengguna jasa rumah sakit. Dimana harapan ini ditentukan oleh pengalaman masa lalu terhadap jasa atau produk yang pernah digunakan, informasi layanan yang diterima dari berbagai sumber atau janji-janji dan faktor internal dari pengguna jasa rumah sakit sendiri (Purwoastuti dan Walyani, 2015). Pelayanan prima dalam konteks pelayanan rumah sakit berarti pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien sehingga pasien dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaannya kepada rumah sakit (Endarini, 2001).

Kepuasan pasien merupakan kunci penting meningkatkan *quality care* dalam pelayanan kesehatan, *health care provider* perlu menyadari bahwa keuntungan utama sistem pelayanan

kesehatan adalah pasien. Pasien yang puas akan selalu nyaman di rumah sakit dalam waktu lama, selalu kembali dan merekomendasikan kepada orang lain. 3 hal ini merupakan bagian indikator pengukuran kepuasan pasien dalam penilaian terhadap penyedia layanan kesehatan, dengan meningkatnya pertumbuhan rumah sakit yang berbanding lurus dengan peningkatan pengetahuan pasien tentang apa yang seharusnya didapatkan, maka pasien membutuhkan rumah sakit yang menyediakan semua yang dibutuhkan. Selain 3 indikator tersebut, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pasien antara lain: prosedur administrasi, pelayanan diagnosis, perilaku staf, kebersihan, kepedulian perawat, makanan, komunikasi, kedekatan psikologi, *housekeeping*, pelayanan teknis, akses dan alat yang memadai. Jika semua ini berjalan baik maka akan meningkatkan jumlah pasien dan tentu meningkatkan pendapatan rumah sakit. Vera (1993) mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah kewajiban *health care provider*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan RSUD Kecamatan Mandau sebagai berikut.

Table 3.1.  
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
Dalam Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pengelolaan Pelayanan Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.	Perencanaan obat di Instalasi Farmasi RSUD Kecamatan Mandau belum terlaksana dengan baik.
		Monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) terkait pelayanan farmasi belum terlaksana dengan baik.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan kesehatan.	Monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) belum mencapai target yang telah ditetapkan;
Sarana, prasarana dan alkes belum terpenuhi sesuai standar	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.	Perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alkes belum sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan ASPAK.
	Pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes belum optimal.	Inventarisasi sarana, prasarana dan alkes yang belum berjalan dengan efektif sehingga menyulitkan pada proses pemeliharaan dan kalibrasi alkes.
Pengelolaan SDM belum optimal	Perlunya Peningkatan kompetensi SDM terutama terkait layanan unggulan.	Pengadaan alat-alat canggih dan ditetapkannya layanan unggulan di unit pelayanan tidak seiring dengan peningkatan kompetensi SDM.
	Sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum terlaksana dengan baik.	Pemberian penghargaan ataupun <i>punishment</i> dari hasil evaluasi kinerja pegawai belum dilaksanakan secara optimal, sehingga mempengaruhi tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja.
	Belum Sinkronnya Rencana Pengembangan SDM di bagian Diklat dengan anggaran yang tersedia.	Anggaran yang tidak memadai mengakibatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
	Penempatan SDM yang belum sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan.	Proses mutasi dan penempatan pegawai di unit-unit pelayanan belum dikelola secara optimal sehingga masih ditemukan pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya.
Pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan	Masih kurangnya promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan	Informasi yang diterima masyarakat terkait jenis layanan yang tersedia termasuk layanan unggulan masih

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
dan alat-alat canggih belum optimal	ketersediaan alat-alat canggih.	belum optimal, hal ini disebabkan masih rendahnya koordinasi dan integrasi fungsi pemasaran dengan fungsi pelayanan dalam rangka merancang, mengkomunikasikan, menentukan harga, dan menghasilkan produk layanan kesehatan.
Pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SIM RS.	Penyelenggaraan SIM RS di RSUD Kecamatan Mandau belum optimal karena belum tersedianya unit kerja fungsional dengan sumber daya Manusia yang kompeten dan terlatih sehingga penyelenggaraan SIM RS dari unsur keamanan secara fisik, jaringan dan sistem aplikasi belum tercapai, hal Ini sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Tata kelola keuangan PPK-BLUD belum optimal.	Kebijakan terkait implementasi PPK BLUD Masih kurang.	Pelaksanaan PPK BLUD belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan BLUD.
	Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD.	Penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensi/ <i>basic education</i> .
	Sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam penatausahaan keuangan walaupun sudah mencukupi namun belum semua memahami prinsip PPK BLUD.	Beberapa SDM belum pernah mengikuti pelatihan dan bimtek tentang PPK BLUD.
	Masih adanya keterlambatan penyampaian RBA.	Keterlibatan bidang/bagian terkait dalam penyusunan anggaran belum maksimal.

Hasil identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau :

1. Belum optimalnya pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan kesehatan;
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit kelas C;
4. Pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes belum optimal;
5. Perlunya peningkatan kompetensi SDM;
6. Sistem *reward* dan *punishment* belum terlaksana dengan baik;
7. Belum sinkronnya rencana pengembangan SDM di bagian diklat dengan anggaran yang tersedia;
8. Penempatan SDM yang belum sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan;
9. Masih kurangnya promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan ketersediaan alat-alat canggih;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SIM RS;
11. Kebijakan terkait implementasi PPK BLUD masih kurang;
12. Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD;
13. Sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam penatausahaan keuangan walaupun sudah mencukupi namun belum semua memahami prinsip PPK BLUD;
14. Masih adanya keterlambatan penyampaian RBA.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis

kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah “***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera***”.

***Bermarwah*** merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan perekonomian masyarakat. ***Maju***, merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan menggerakkan serta memperkuat karakteristik masyarakat yang handal dan berdaya saing, dengan bersandarkan pada nilai-nilai Budaya Melayu sehingga terciptanya pelayanan publik yang baik dan keharmonisan dalam masyarakat. ***Sejahtera***, merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan yang memiliki kemampuan meningkatkan aksesibilitas infrastruktur antar daerah dan antar wilayah, mengoptimalkan potensi Kabupaten Bengkalis sebagai daerah perbatasan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat;

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau, yaitu:

1. Mewujudkan kondisi pemerintahan berrmarwah diperlukan kemampuan mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju, mewujudkan SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing, serta mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ini menjadi permasalahan pokok yang paling terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau karena visi RPJMD menekankan pada pemerintahan yang berrmarwah dan salah satu misi RPJMD yaitu mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian;
2. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Kabupaten Bengkalis yang Maju. Bila pemerintahan yang maju terwujud berarti pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien dan produktif, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber

daya aparatur dapat terwujud. Ini berimplikasi pada diperlukannya upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih intensif.

3. Adanya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum bagi RSUD Kecamatan Mandau untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang terkait dengan RSUD Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi RSUD Kecamatan Mandau

<b>Visi RPJMD</b>									
<b>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera</b>									
<b>Misi ke-1</b>									
<b>Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian</b>									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing	Terwujudnya SDM yang Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,46 Poin	74,06 Poin	74,47 Poin	74,88 Poin	75,30 Poin	75,71 Poin	76,12 Poin
	Meningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,2 Tahun	71,36 Tahun	71,55 Tahun	71,71 Tahun	71,86 Tahun	72,03 Tahun	72,2 Tahun

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra RSUD Kecamatan Mandau perlu menelaah Renstra Kementerian Kesehatan.

Visi Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah Visi Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan kepada misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan, salah satu tujuan Kementerian Kesehatan yang sejalan adalah tujuan pertama yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan sasaran strategis meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat yang diukur dengan indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan target capaian 95%. Selanjutnya adalah tujuan kedua yaitu penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan diukur dengan indikator persentase RS terakreditasi dan target capaian 100%. Terakhir adalah tujuan keempat yaitu peningkatan sumber daya kesehatan dengan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai

standar diukur dengan indikator persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) dan target capaian 90%.

Berdasarkan visi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra RSUD Kecamatan Mandau yaitu bagaimana meningkatkan profesionalisme SDM, pemenuhan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar dan meningkatkan manajemen pelayanan. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD Kecamatan Mandau juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Kesehatan.

Selain menelaah Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, dalam penyusunan Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 juga perlu dilakukan telaahan sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019-2024. Visi Gubernur Riau terpilih periode Tahun 2019 - 2024 adalah Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU). Untuk melaksanakan visi Gubernur Riau periode Tahun 2019-2024 tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menjabarkan misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis. Tugas pokok dan fungsi RSUD Kecamatan mandau selaras dengan tujuan pertama Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu terkendalinya kejadian mortalitas dan morbiditas di Provinsi Riau dan sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan yang diukur dengan indikator persentase fasilitas kesehatan terakreditasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Berdasarkan visi Dinas Kesehatan Provinsi Riau tersebut di atas, ditemukan keterkaitan sasaran strategis Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 yang mendukung sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan manajemen pelayanan. Dengan demikian pencapaian tujuan dan

sasaran Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019-2024.

**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024,**  
**Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, dan RPJMD Kabupaten**  
**Bengkalis Tahun 2021-2026**

<b>K/L/Daerah</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Akhir</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase RS terakreditasi	100 %
	Peningkatan sumber daya kesehatan	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis lainnya (minimal 4 spesialis dasar wajib ada)	90 %
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka harapan hidup	72.03
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	98 %
			Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	RSUD AA : 85
				RSJ Tampan : 90
RS PB : 94				
RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya asing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Pembangunan Manusia	76,122 Poin
			Angka Harapan hidup	72, 2 Tahun

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026 dilakukan oleh Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 19 tahun 2004 dengan partisipasi para stakeholders yaitu beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibantu oleh pakar/akademisi pelaksana penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan. Untuk pelayanan kesehatan program yang terintegrasi dengan KLHS adalah program pemberdayaan sosial; program rehabilitasi sosial; program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan program sediaan farmasi, kesehatan dan makanan minuman.

**Tabel 3.4**  
**Analisis Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**  
**Kabupaten Bengkalis**

NO. TPB	PILAR	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Satuan	Tahun Dasar		Target (Tahun)					Mekanisme TPB	Pelaksana /OPD
								2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
3	SOSIAL	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	Dinas Kesehatan
3	SOSIAL	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	per 1000 KLH	12.0	7.0	1.4	1.0	0.7	0.5	0.4	1	Dinas Kesehatan

3	SOSIAL	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	15.0	12.0	2.0	<1	<1	<1	<1	1	Dinas Kesehatan
---	--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------	---------	------	------	-----	----	----	----	----	---	-----------------

3	SOSIAL	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup .	Menurun menjadi 24	per 1000 KLH	12.0	7.0	1.4	1.0	0.7	0.5	0.4	1	Dinas Kesehatan
3	SOSIAL	3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	Meningkat	per 1000 Penduduk	680.0	790.0	1048.8	1208.8	1393.2	1605.7	1850.7	1	Dinas Kesehatan

					rakat per 1000 pendu duk.												
3	SOS IAL	3. 8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.( a)	Caku pan Jamin an Keseh atan Nasio nal (JKN).	Menin gkat menja di minim al 95%	%	96. 0	98. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	1	Dinas Kesehata n

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pengelolaan pelayanan kesehatan di RSUD Kecamatan Mandau adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengelolaan SDM belum optimal.

Beberapa isu pengelolaan SDM antara lain terkait pengadaan alat-alat canggih di unit pelayanan dan ditetapkannya beberapa layanan unggulan di unit pelayanan yang tidak seiring dengan peningkatan kompetensi SDM. Isu lainnya yaitu pemberian penghargaan ataupun *punishment* dari hasil evaluasi kinerja pegawai belum dilaksanakan secara optimal, sehingga mempengaruhi tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja. Selain itu anggaran yang tidak memadai mengakibatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Isu terakhir adalah proses mutasi dan penempatan pegawai di unit-unit pelayanan belum dikelola secara optimal sehingga masih ditemukan pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya.

#### 2. Pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih belum optimal.

Isu terkait pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih yaitu informasi yang diterima masyarakat terkait jenis layanan yang tersedia termasuk layanan unggulan masih belum optimal, hal ini disebabkan masih rendahnya koordinasi dan integrasi fungsi pemasaran dengan fungsi pelayanan dalam rangka merancang, mengkomunikasikan, menentukan harga, dan menghasilkan produk layanan unggulan di RSUD Kec. Mandau. selain hal tersebut monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar

pelayanan minimal (SPM) terkait pelayanan farmasi belum terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan, monitoring terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) belum mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3. Sarana, prasarana dan alkes belum terpenuhi sesuai standar.

Beberapa isu terkait penyediaan sarana, prasarana dan alkes yang belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas B antara lain, perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alkes belum sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan ASPAK serta inventarisasi sarana, prasarana dan alkes yang belum berjalan dengan efektif sehingga menyulitkan pada proses pemeliharaan dan kalibrasi alkes.

### 4. Pengelolaan Pelayanan Belum Optimal.

Beberapa isu terkait pengelolaan pelayanan yang belum optimal antara lain, perencanaan obat di instalasi farmasi RSUD Bengkalis belum terlaksana dengan baik, selain hal tersebut monitoring pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) terkait pelayanan farmasi belum terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan, monitoring terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SPO) belum optimal dan beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dilihat dengan capaian akreditasi RSUD Kec. Mandau yang hanya baru bisa dapat status terakreditasi Bintang 3 atau terakreditasi madya, dengan harapan terdepannya dapat menjadi status terakreditasi paripurna dengan bintang 5 dan juga dapat pengakuan internasional.

### 5. Pengelolaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum optimal.

Beberapa isu terkait pengelolaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS) yang belum optimal antara lain, belum tersedianya unit kerja fungsional dengan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih sehingga penyelenggaraan SIM RS dari unsur keamanan secara fisik, jaringan dan sistem aplikasi belum tercapai, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

#### 6. Tata kelola keuangan PPK-BLUD belum optimal.

Beberapa isu terkait tata kelola keuangan PPK-BLUD yang belum optimal antara lain, pelaksanaan PPK BLUD belum sepenuhnya berpedoman pada kebijakan BLUD, penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensi/*Basic education*, beberapa SDM belum pernah mengikuti pelatihan dan bimtek tentang PPK BLUD dan keterlibatan Bidang/Bagian terkait dalam penyusunan anggaran belum maksimal.

Menurut hasil dan kajian serta analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau terdapat beberapa permasalahan yang dinilai urgen untuk dianalisis lebih dalam untuk ditindak lanjuti pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

##### 1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
- b. RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS rujukan dengan Tipe C;
- c. Terdapatnya jumlah sarana, prasarana dan alkes yang memadai;
- d. RSUD Kecamatan Mandau sudah akreditasi Madya;
- e. Sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD;
- f. Tersedianya SIM RS terintegrasi untuk pelaksanaan pelayanan.
- g. Memiliki Tenaga Kesehatan yang profesional
- h. Tersedianya Tenaga Medis Spesialis dan Sub spesialis dan tenaga profesional lainnya sebagai PNS dan Non PNS

##### 2. Kelemahan (*weakness*)

- a. Kualitas SDM masih belum memadai;

- b. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset RSUD Kecamatan Mandau;
- c. Belum optimalnya promosi dan pemasaran tentang pelayanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih;
- d. Masih kurangnya Integritas SDM;
- e. Pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes belum optimal;
- f. Kantor untuk manajemen masih menggunakan ruang rawat inap;
- g. Perlu penambahan sarana, prasarana dan alkes sesuai rencana pengembangan layanan kesehatan;
- h. Pengelolaan SIM RS belum memadai.

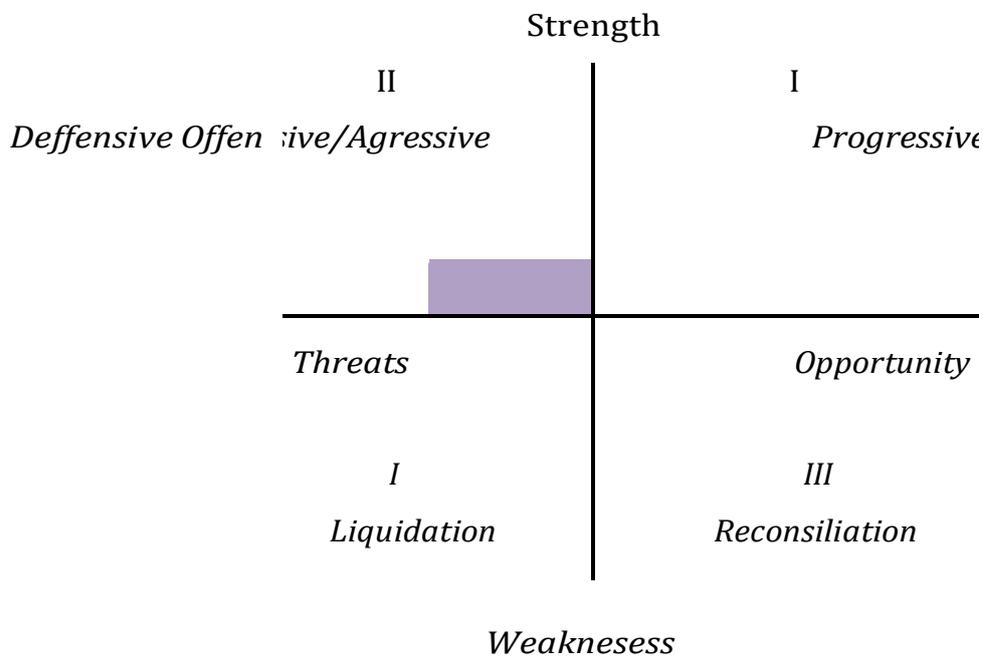
### 3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pelayanan Kesehatan;
- b. RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS rujukan dengan Tipe C;
- c. Tersedianya bantuan dari APBN dan APBD Provinsi Riau untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alkes;
- d. Kemajuan teknologi dan peluang KSO;
- e. Terlaksananya kerjasama dengan institusi pendidikan, pemberi jaminan kesehatan, swasta dan fasilitas kesehatan lainnya.
- f. Adanya PPK BLUD.

### 4. Ancaman (*Threat*)

- a. Koordinasi antar Dinas terkait belum optimal;
- b. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Tingginya kecenderungan masyarakat untuk berobat ke negeri seberang;
- d. *Force Majeure*;
- e. Rasionalisasi atau *Refocussing* anggaran;
- f. Masalah hukum atau tuntutan dari pelanggan rumah sakit.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan analisis SWOT (*Strength, weakness, Opportunity dan Threat*). Hasil yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan RSUD Kecamatan Mandau. Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan juga di ketahui posisi Organisasi RSUD Kecamatan Mandau berada pada Quadran II artinya masih dalam posisi *Deffensive Offensive/Agressive*, mempunyai kekuatan dan peluang untuk dikembangkan.



Strategi dapat disusun dengan mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Analisis SWOT**

<p style="text-align: center;"><b>Faktor</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pelayanan Kesehatan;</li> <li>2. RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS rujukan;</li> <li>3. Tersedianya Bantuan dari APBN dan APBD Provinsi Riau untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alkes;</li> <li>4. Kemajuan teknologi dan peluang KSO;</li> <li>5. Terlaksananya kerjasama dengan institusi pendidikan, pemberi jaminan kesehatan, swasta dan fasilitas kesehatan lainnya.</li> </ol>	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar dinas terkait belum optimal;</li> <li>2. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li> <li>3. Tingginya kecenderungan masyarakat untuk berobat ke negeri seberang;</li> <li>4. Banyaknya RS swasta</li> <li>5. <i>Force Majeure</i>;</li> <li>6. Rasionalisasi atau <i>refocusing</i> anggaran;</li> <li>7. Masalah hukum atau tuntutan dari pelanggan rumah sakit.</li> </ol>
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;</li> <li>2. RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS Rujukan;</li> <li>3. Terdapatnya jumlah sarana, prasarana dan alkes yang memadai;</li> <li>4. Peringkat</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;</li> <li>2. Peningkatan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan;</li> <li>3. Optimalisasi promosi dan pemasaran</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kualitas dokumen pengajuan pembayaran;</li> <li>2. Optimalisasi Ketersediaan Kebijakan dalam implementasi sistem informasi;</li> </ol>

<p>Akreditasi Madya;</p> <p>5. Sudah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD;</p> <p>6. Tersedianya SIM RS terintegrasi untuk pelaksanaan pelayanan.</p>	<p>pelayanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih;</p> <p>4. Optimalisasi peningkatan ketersediaan SDM yang mumpuni;</p> <p>5. Optimalisasi peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit kelas C;</p> <p>6. Mengoptimalkan pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes.</p>	
<p>Kelemahan (W):</p> <p>1. Kualitas SDM masih belum memadai;</p> <p>2. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset RSUD Mandau;</p> <p>3. Belum Optimalnya Promosi dan Pemasaran Pelayanan Unggulan dan Ketersediaan Peralatan canggih;</p> <p>4. Masih kurangnya Integritas SDM;</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>3. Sinkronisasi rencana pengembangan SDM di bagian diklat dengan anggaran yang tersedia;</p> <p>4. Optimalisasi peningkatan disiplin dalam penginputan data.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>1. Percepatan penambahan SDM IT;</p> <p>2. Percepatan penyusunan kebijakan terkait implementasi PPK BLUD;</p> <p>3. Percepatan peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD</p> <p>4. Percepatan penyampaian RBA;</p> <p>5. Percepatan keterlibatan bidang/bagian terkait penyusunan anggaran;</p>

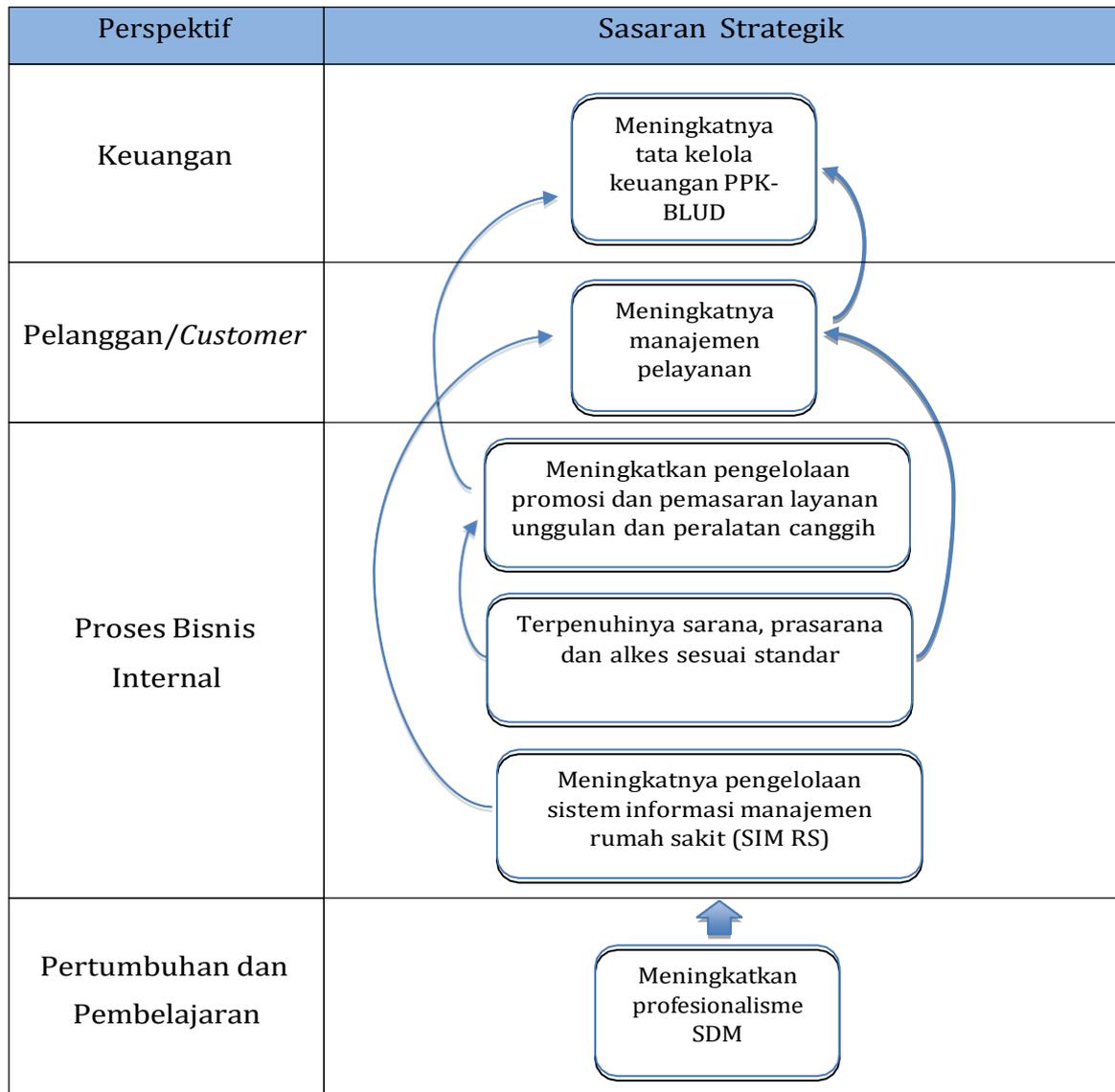
<p>5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Sarana, Prasarana dan alkes belum optimal;</p> <p>6. Kantor untuk manajemen masih menggunakan ruang rawat inap;</p> <p>7. Perlu penambahan sarana, prasarana dan alkes sesuai rencana pengembangan layanan kesehatan;</p> <p>8. Pengelolaan SIM RS belum memadai.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### 3.5.1 Rencana Pengembangan Layanan RSUD Kecamatan Mandau

#### a. Peta Strategi

Alternatif Strategi dari analisis SWOT (Tabel 3.5) kemudian disajikan kedalam bentuk peta yang sistematis berupa peta strategi sehingga dapat terlihat hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis yang lain.

**Gambar 3.2**  
**Peta Strategis**



b. Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) Setiap PerspektifTabel 3.6.  
*Key Performance Indicators* (KPI)

Perspektif	Sasaran Strategik	<i>Key Performance Indicators</i> (KPI)
Keuangan	Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD	<i>Cost recovery rate</i>
Pelanggan/Customer	Meningkatnya manajemen pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
		Akreditasi Rumah Sakit
Proses Bisnis Internal	Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian standar pelayanan minimal (SPM)
	Terpenuhinya sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) rumah sakit (ASPAK)
	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi
Pertumbuhan dan Pembelajaran	Meningkatkan profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi

## c. Inisiatif Strategis Rencana Pengembangan Layanan RSUD

Tabel 3.7.  
Inisiatif Strategis

Perspektif	Key Performance Indicators (KPI)	Inisiatif Strategis
Keuangan	<i>Cost recovery rate</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan tarif sesuai unit cost.</li> <li>- Penataan pengelolaan keuangan berbasis <i>accrual</i></li> <li>- Percepatan proses klaim JKN</li> <li>- Pemanfaatan IT dalam pengelolaan keuangan</li> <li>- Perencanaan dan pengendalian anggaran sesuai SPO dan SPM</li> </ul>
Pelanggan/Customer	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan yang cepat, aman dan nyaman</li> <li>- Peningkatan Good Clinical Governace dan Penanganan Pengaduan</li> </ul>
	Akreditasi Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki alur dan ruang pelayanan yang memadai</li> <li>- Pemenuhan standar Akreditasi, standar Pelayanan Publik dan sebagai wahana Pendidikan</li> </ul>
Proses Bisnis Internal	Capaian standar pelayanan minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan layanan unggulan</li> <li>- Pengelolaan Perencanaan pengadaan obat, vaksin dan BHP</li> </ul>

	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) rumah sakit (ASPAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sarana prasarana dan meningkatkan upaya pemeliharaan</li> <li>- Pengembangan layanan unggulan dan canggih</li> </ul>
	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	- Meningkatkan implementasi SIM RS dalam manajemen
Pertumbuhan dan Pembelajaran	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Pelatihan dan Pendidikan pegawai</li> <li>- Pengembangan inovasi dibidang pelayanan.</li> <li>- Pembayaran insentif dokter dan pegawaitepat waktu.</li> <li>- Peningkatan mutu, pengendalian dan pengawasan kinerja pegawai.</li> </ul>

Mengingat RSUD Kecamatan Mandau sebagai salah satu perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dipemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi melayani masyarakat, maka RSUD Kecamatan Mandau perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Bila inisiatif strategis seluruh *key performance indicators* dari setiap perspektifdi tabel 3.6. dilaksanakan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat di RSUD Kecamatan Mandau sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan diperlukan penetapan unsur penilaian untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan.

---

**TUJUAN DAN SASARAN**

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah*

---

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka RSUD Kecamatan Mandau dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan wajib Pelayanan dasar bidang Kesehatan dengan tujuan yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Prima”**, sebagai indikatornya adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akreditasi RS

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 6 (enam) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatkan profesionalisme SDM, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi.
2. Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Capaian standar pelayanan minimal (SPM)
3. Terpenuhinya sarana, prasarana dan alkes sesuai standar, dengan indikator sasaran adalah:

- ✓ Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) rumah sakit (ASPAK)
- 4. Meningkatnya manajemen pelayanan, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Capaian Akreditasi rumah sakit dan Indek Kepuasan Masyarakat
- 5. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS), dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Unit Pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi.
- 6. Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ *Cost recovery rate*

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra RSUD Kecamatan Mandau 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						
				2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Mewujudkan Pelayanan Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%	88	90	91	92	93	94%	
			Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya (***)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	
		Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian standar pelayanan minimal (SPM)	90	90	90	91	92	93	94	
		Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) rumah sakit (ASPAK)	78	78	79	80	81	82	83	
		Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Akreditasi Rumah Sakit	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	B	B	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Pengelolaan SIM RS	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	98	98	98	99	99	100	100	
Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost Recovery Rate	38	38	38	39	39	40	42			

Pengertian dan formulasi perhitungan masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pengertian:

Nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang dibelikan oleh RSUD Kecamatan Mandau.

Dasar:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sumber Data:

Data unit Humas Sub bagian tentang hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di rawat jalan dan rawat inap.

Formulasi perhitungan:

Menggunakan pengukuran Skala Likert

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$IKM = SKM \text{ unit pelayanan} \times 25$
----------------------------------------------

Tabel 4.2.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,  
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

## 2. Status Akreditasi Rumah Sakit

### Pengertian :

Status akreditasi rumah sakit adalah penghargaan yang diterima rumah sakit dari lembaga independen penyelenggara akreditasi berdasarkan keputusan akreditasi terhadap capaian standard nasional akreditasi rumah sakit dengan tingkatan tidak lulus, dasar (bintang 2), madya (bintang 3), utama (bintang 4) dan Paripurna (bintang 5).

### Dasar :

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

### Sumber Data:

Sertifikat akreditasi yang diterima rumah sakit dari lembaga independen penyelenggara akreditasi.

### Formulasi perhitungan:

Status akreditasi rumah sakit

### 3. Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi.

#### Pengertian:

Persentase tenaga fungsional tertentu di RSUD Kecamatan Kecamatan Mandau yang memiliki surat izin kerja (SIK)/surat izin praktik (SIP) sesuai dengan profesinya.

#### Dasar:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

#### Sumber Data:

Data Sub Bagian Administarasi dan Kepegawaian tentang masa berlaku surat izin praktik (SIP)/surat izin kerja (SIK) tenaga kesehatan di RSUD Kecamatan Mandau.

#### Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan fungsional tertentu yang memiliki SIK/SIP}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kesehatan fungsional tertentu}} \times 100\%$$

### 4. Capaian standar pelayanan minimal (SPM).

#### Pengertian:

Persentase indikator SPM yang telah tercapai di RSUD Kecamatan Mandau.

#### Dasar:

Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kec. Mandau

#### Sumber Data:

Data Bidang Pelayanan tentang Capaian SPM di RSUD Kec. Mandau.

Sumber Data :

Data Bidang Pelayanan tentang capaian SPM RSUD Kec. Mandau.

Formulasi perhitungan:

Jumlah Indikator yang tercapai dalam SPM	x	100	=	.....
Jumlah Seluruh Indikator SPM di Rumah Sakit		%		

5. Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) rumah sakit (ASPAK).

Pengertian:

Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD Kecamatan Mandau berdasarkan hasil validasi data pada aplikasi sarana, prasarana & alat kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan. ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Dasar:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan.

Sumber data:

Analisa data individual Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dari menu status data faskes di ASPAK.

Formulasi perhitungan:

Akumulasi tingkat kelengkapan data SPA (%) dari data presentasi kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan.

6. Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit

Pengertian:

Capaian standard akreditasi rumah sakit adalah presentase tingkat kepatuhan terhadap elemen penilaian standard akreditasi di seluruh organisasi rumah sakit dengan nilai  $\geq 80\%$  untuk tingkat kepatuhan terpenuhi lengkap, 20-79% untuk tingkat kepatuhan terpenuhi sebagian dan  $< 20\%$  untuk tingkat kepatuhan tidak terpenuhi.

Dasar:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Sumber Data:

Laporan survey akreditasi yang dibuat oleh surveyor.

Formulasi perhitungan:

Skor kepatuhan terhadap elemen penilaian

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pengertian:

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap komponen besar manajemen kinerja RSUD Kec. Mandau, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Dasar:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis  
Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD Kec. Mandau.

Formulasi perhitungan:

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) RSUD Kec. Mandau

8. Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi.

Pengertian:

Persentase unit layanan yang sudah tersedia sistem komputer terintegrasi/SIM RS di RSUD Kecamatan Mandau.

Dasar:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Sumber Data:

Data Sub Bagian Rekam Medik tentang pelaksanaan SIM RS di tiap unit layanan yang terintegrasi SIM RS.

Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah total capaian pelaksanaan SIM RS di unit layanan}}{\text{Jumlah seluruh unit layanan dengan SIM RS}} \times 100\%$$

9. *Cost recovery rate*

Pengertian:

Nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya.

Dasar:

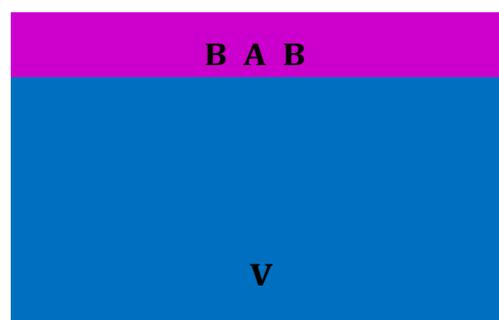
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Bengkalis 530/KPTS/XII/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Sumber Data:

Data Sub bagian Pembukuan RSUD Kecamatan Mandau tentang seluruh pendapatan dan seluruh belanja dalam laporan keuangan tahunan.

Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Total Revenue (TR)}/\text{Total Pendapatan}}{\text{Total (TC)}/\text{Total Pengeluaran}} \times 100\%$$



## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

*Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah*

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

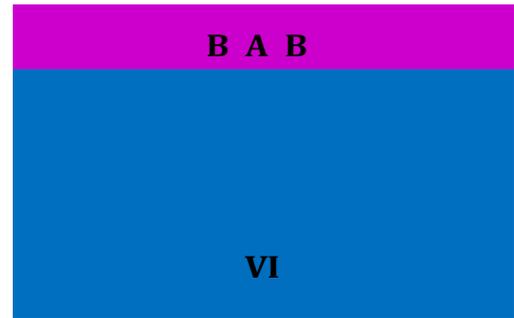
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra RSUD Kecamatan Mandau 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Renstra RSUD Kecamatan Mandau 2021-2026

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera</b>					
<b>Misi I : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian</b>					
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan Pelayanan Yang Prima	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Mendorong Meningkatnya Pengelolaan SDM	Optimalisasi peningkatan kompetensi SDM; sistem reward dan punishment, dan penempatan SDM sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan serta Sinkronisasi rencana pengembangan SDM di bagian diklat dengan anggaran yang tersedia.
	Capaian Akreditasi Rumah Sakit (RS)	Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian standar pelayanan minimal (SPM)	Mendorong pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Percepatan promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih
		Terpenuhinya	Persentase	Mendorong	Optimalisasi ketersediaan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KAB. BENGKALIS

		sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) rumah sakit (ASPAK)	terpenuhinya sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit ; dan pemeliharaan, kalibrasi sarana, prasarana dan alkes;;
		Meningkatnya manajemen pelayanan		Mendorong meningkatnya manajemen pelayanan	1. Optimalisasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; 2. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan kesehatan.
		Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	Mendorong pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SIM RS
		Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost Recovery Rate (CRR)	Mendorong tata kelola keuangan PPK-BLUD	Percepatan penyusunan kebijakan terkait implementasi PPK BLUD, peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang memahami prinsip PPK BLUD dan penyampaian dokumen RBA sesuai ketentuan

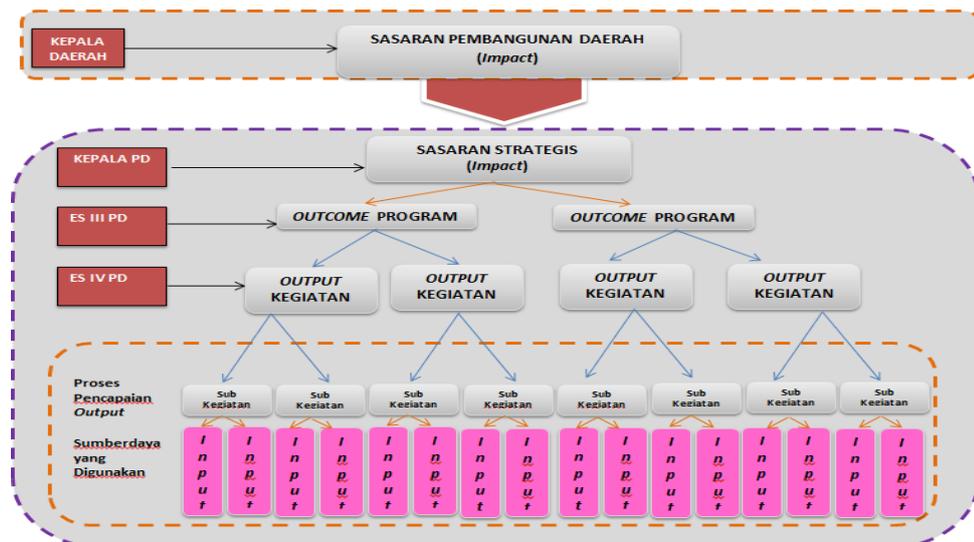


**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

*Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif PD selama lima tahun*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1. Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat

daerah. Sedangkan pencapaian *outcome* suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian *output* kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan (*input* dan proses).

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di RSUD Kecamatan Mandau pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Kecamatan Mandau disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708 dan pelaksanaannya direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan operasional kantor.

##### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

###### a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi, Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit.

##### 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

###### a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada RSUD Kecamatan Mandau

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna.

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan pembayaran jasa tenaga keamanan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur pada perangkat daerah.

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Sub kegiatan ini bertujuan untuk Bimbingan Teknis implementasi perundang-undangan bagi Pegawai

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pelatihan bagi pegawai.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan rumah tangga rumah sakit.

d. Penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan logistik kantor.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk barang cetakan dan penggandaan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor.

a. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan mebeleur.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan/menyediakan peralatan dan mesin lainnya.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2.3.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik.

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor.

2.3.2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengurusan izin kendaraan dinas/operasional.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2.3.3 Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan operasional pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD

a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD.

B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit.

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit

a. Pengembangan rumah sakit

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan rumah sakit.

b. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung rumah sakit.

e. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan.

f. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit.

g. Pengadaan Obat, Vaksin

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan obat rumah sakit.

h. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit.

i. Pemeliharaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih.

- j. Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan perlengkapan rumah sakit.

- k. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit

- a. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk media promosi yang disediakan.

- b. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk kegiatan pendukung akreditasi A

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sistem komputer terintegrasi di unit pelayanan.

- a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan penunjang SIM RS.

## C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa pelayanan sumber daya manusia kesehatan.

a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga kesehatan rumah sakit.

D.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan dan Promosi kesehatan rumah sakit.

1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan mutu dan peningkatan Promosi dan Publikasi kesehatan rumah sakit

a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan Promosi dan Publikasi Rumah Sakit

Rincian program dan kegiatan Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026**  
**Kabupaten Bengkalis**

Urusan : Unsur Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar																						
Bidang Urusan : Kesehatan																						
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	1 02 03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit	93%	93	15.615.898.712	94	15.750.740.860	95	16.007.593.057	96	16.212.441.018	97	16.420.168.304	98	16.943.318.359	98	96.950.160.310
	Capaian Akreditasi Rumah Sakit			Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 02 03 2,02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk ulp dan ulm di wilayah kabupaten/kota	Persentase pembayaran jasa pelayanan sumber daya manusia kesehatan	100	100	15.615.898.712	100	15.750.740.860	100	16.007.593.057	100	16.212.441.018	100	16.420.168.304	100	16.943.318.359	100	96.950.160.310
				Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya	1 02 03 2,02 02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai	Jumlah jasa tenaga kesehatan rumah sakit yang dibayarkan	262 orang	262	15.615.898.712	262	15.750.740.860	262	16.007.593.057	262	16.212.441.018	262	16.420.168.304	262	16.943.318.359	1.572	96.950.160.310
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 02 01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor	93%	93	73.241.588.649	94	73.074.024.435	95	75.078.710.973	96	76.039.487.571	97	77.013.768.767	98	79.467.443.819	98	454.715.024.214
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian RS	1 02 01 2,05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN	%	100	385.000.000	100	443.000.000	100	605.500.000	100	625.000.000	100	640.500.000	100	722.000.000	100	3.421.000.000
				Terlaksananya Diklat Pegawai Sesuai Tupoksi	1 02 01 2,05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam setahun	orang	0	-	0	-	14	150.000.000	14	155.000.000	14	160.000.000	14	165.000.000	56	630.000.000
				Terlaksananya peningkatan pemahaman teknis peraturan perundang-undangan	1 02 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan	14 orang	14	150.000.000	14	153.500.000	14	155.500.000	14	160.000.000	14	165.000.000	14	200.000.000	84	984.000.000
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 02 01 2,06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 kelompok	3	35.000.000	3	39.500.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	45.500.000	3	50.000.000	18	255.000.000
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	1 02 01 2,06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	kegiatan	4	200.000.000	4	250.000.000	4	260.000.000	4	265.000.000	4	270.000.000	4	307.000.000	24	1.552.000.000
				Terlaksananya Administasi Keuangan RS	1 02 01 2,02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	%	100	28.067.588.649	100	28.126.024.435	100	28.215.710.973	100	28.488.487.571	100	28.697.268.767	100	28.984.943.819	100	170.580.024.214
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan	1 02 01 2,02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	orang	200	28.067.588.649	200	28.126.024.435	200	28.215.710.973	200	28.488.487.571	200	28.697.268.767	200	28.984.943.819	1.200	170.580.024.214

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KAB. BENGKALIS

				Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah	1	02	01	2,03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna	%	100	1.039.000.000	100	1.050.000.000	100	1.100.000.000	100	1.180.000.000	100	1.225.500.000	100	1.350.000.000	100	6.944.500.000		
				Tersedianya jasa tenaga keamanan	1	02	01	2,03	02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	orang	34	1.039.000.000	34	1.050.000.000	34	1.100.000.000	34	1.180.000.000	34	1.225.500.000	34	1.350.000.000	204	6.944.500.000	
		Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian standar pelayanan minimal (SPM)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	90%	91	48.769.203	92	49.190.321	93	49.992.483	94	50.632.233	95	51.280.975	96	52.914.798	96	302.780.013		
				Terlaksananya pelaksanaan Promosi dan Preventif bidang Kesehatan	1	02	05	2,02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi dan Preventif Bidang Kesehatan	%	100	48.769.203	100	49.190.321	100	49.992.483	100	50.632.233	100	51.280.975	100	52.914.798	100	302.780.013		
				Tersedianya hasil capaian kinerja perangkat daerah	1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Promosi dan Publikasi Rumah Sakit	%	100	48.769.203	100	49.190.321	100	49.992.483	100	50.632.233	100	51.280.975	100	52.914.798	100	302.780.013	
				Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1	02	02		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan	%	100	8.632.148.882	100	8.706.686.859	100	8.848.669.491	100	8.961.905.247	100	9.076.732.635	100	9.410.919.268	100	53.637.062.382		
				Terlaksananya peyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2,02	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	100		100		100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000
				Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan	1	02	02	2,02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah media promosi dan Publikasi yang disediakan	jenis			2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000	
				Tersedianya Layanan Kesehatan Rujukan	1	02	02	2,02		Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	100		100	100.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	475.000.000	
				Terlaksananya Akreditasi RS	1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pendukung akreditasi	kegiatan			4	100.000.000	4	110.000.000	4	115.000.000	4	150.000.000	16	475.000.000			
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	02	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor	%																
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1	02	01	2,01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	150.000.000	100	155.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100	175.250.000	100	250.000.000	100	1.075.250.000		
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja RS	Dokumen	7	150.000.000	7	155.000.000	7	170.000.000	7	175.000.000	7	175.250.000	7	250.000.000	42	1.075.250.000	
				Terpenuhiya Jasa Penunjang Kantor	1	02	01	2,08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	%	100	2.250.000.000	100	2.455.000.000	100	2.460.500.000	100	2.506.000.000	100	2.556.250.000	100	2.820.000.000	100	15.047.750.000		

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KAB. BENGKALIS

		Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan sarana komunikasi	1	02	01	2,08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	tagihan	5	2.000.000.000	5	2.150.000.000	5	2.155.000.000	5	2.200.000.000	5	2.250.000.000	5	2.500.000.000	30	13.255.000.000
		Terpenuhinya jasa Pelayanan umum Kantor	1	02	01	2,08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	orang	5	250.000.000	5	305.000.000	5	305.500.000	5	306.000.000	5	306.250.000	5	320.000.000	30	1.792.750.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah	1	02	01	2,09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas	%	100	2.850.000.000	100	2.935.000.000	100	3.000.000.000	100	3.010.000.000	100	3.060.000.000	100	3.150.000.000	100	18.005.000.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional/lapangan	1	02	01	2,09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	Unit	12	350.000.000	12	405.000.000	12	450.000.000	12	455.000.000	12	460.000.000	12	500.000.000	72	2.620.000.000
		Tersedianya Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya	1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan	orang	60	2.500.000.000	60	2.530.000.000	60	2.550.000.000	60	2.555.000.000	60	2.600.000.000	60	2.650.000.000	360	15.385.000.000
Terpenuhinya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standart	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (ASPAK) RS	Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1	02	02			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit	78%	78		79		80		81		82		83		83	-
		Terlaksananya peyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2,01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit	%	100	8.482.148.882	100	8.555.686.859	100	8.571.669.491	100	8.673.905.247	100	8.782.732.635	100	9.035.919.268	100	52.102.062.382
		Terlaksananya pengembangan Rumah Sakit	1	02	02	2,01	05	Pengembangan rumah sakit	Jumlah kegiatan pengembangan rumah sakit yang dilaksanakan	kegiatan	0	0	0	5	150.000.000	5	150.000.000	5	155.000.000	5	166.000.000	20	621.000.000	
		Tersedianya Alat kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2,01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	kelompok	5	500.000.000	5	510.000.000	5	510.000.000	5	515.000.000	5	520.000.000	5	525.000.000	30	3.080.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2,01	18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air	kegiatan	4	897.000.000	4	900.000.000	4	910.000.000	4	920.000.000	4	930.000.000	4	940.000.000	24	5.497.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Kesehatan	1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan	kegiatan	3	490.406.082	3	540.000.000	3	550.000.000	3	560.000.000	3	560.000.000	3	580.000.000	18	3.280.406.082
		Terlaksananya Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	kelompok	3	300.000.000	3	300.000.000	3	285.000.000	3	300.000.000	3	320.000.000	3	355.000.000	18	1.860.000.000
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan obat-obatan di RS	1	02	02	2,01	16	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah jenis obat rumah sakit yang disediakan	kelompok	3	3.001.742.800	3	3.006.686.859	3	3.018.669.491	3	3.055.669.491	3	3.066.732.635	3	3.224.919.268	18	18.374.420.544

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KAB. BENGKALIS

			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Bahan Habis Kesehatan RS	1	02	02	2,01	17	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit yang disediakan	kelompok	2	3.293.000.000	2	3.299.000.000	2	3.148.000.000	2	3.173.235.756	2	3.231.000.000	2	3.245.000.000	12	19.389.235.756
			<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah</b>	1	02	01			<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	%															
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1	02	01	2,07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor	%	100	1.350.000.000	100	1.187.000.000	100	1.500.000.000	100	1.510.000.000	100	1.525.500.000	100	1.540.500.000	100	8.613.000.000
			Tersedianya meubeler perlengkapan kantor	1	02	01	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit	30	350.000.000	30	87.000.000	30	200.000.000	30	205.000.000	30	215.500.000	30	225.500.000	180	1.283.000.000
			Tersedianya meubeler perlengkapan kantor	2	03	01	2,07	05	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit		1.000.000.000		200.000.000		300.000.000		305.000.000		310.000.000		315.000.000	-	2.430.000.000
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1	02	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	unit	0		0	900.000.000	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	36	4.900.000.000
		Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	1	02	02			<b>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	<b>Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit</b>															
			Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	1	02	02	2,03		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	%	98	150.000.000	98	151.000.000	98	152.000.000	99	153.000.000	99	154.000.000	100	200.000.000	100	960.000.000
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan RS	1	02	02	2,03	02	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang SIMRS	kegiatan	6	150.000.000	6	151.000.000	6	152.000.000	6	153.000.000	6	154.000.000	6	200.000.000	36	960.000.000
		Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	1	02	01			<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor</b>	98	98		98		98		99	99		100	100			
			Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	%	100	150.000.000	100	168.000.000	100	527.000.000	100	695.000.000	100	833.500.000	100	950.000.000	100	3.323.500.000
			Tersedianya peralatan listrik kantor	1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik	jenis	0	-	0	-	28	150.000.000	28	200.000.000	28	250.000.000	28	300.000.000	112	900.000.000
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	kelompok	0	-	0	-	6	103.500.000	6	105.000.000	6	105.500.000	6	110.000.000	24	424.000.000
			Tersedianya peralatan rumah tangga keperluan kantor	1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	kelompok	38	50.000.000	38	63.000.000	38	63.500.000	38	65.000.000	38	68.000.000	38	70.000.000	228	379.500.000
			Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor	1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan	item	2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.000.000	2	220.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	12	1.085.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KAB. BENGKALIS

			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	kegiatan	0	-	0	-	3	100.000.000	3	105.000.000	3	160.000.000	3	170.000.000	12	535.000.000
	Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost Recovery Rate (CRR)	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan operasioanal pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD	%	38	37.000.000.000	38	37.355.000.000	38	37.500.000.000	39	37.850.000.000	39	38.300.000.000	40	39.700.000.000	40	227.705.000.000
			Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	02	01	2,10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD	Kelompok	3	37.000.000.000	3	37.355.000.000	3	37.500.000.000	3	37.850.000.000	3	38.300.000.000	3	39.700.000.000	3	227.705.000.000
												97.538.405.446	98.380.642.475	99.984.966.004	101.264.466.069	102.561.950.681	105.874.596.244	605.605.026.919							

**Tabel 6.2**  
**Keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

RPJMD 2021-2026					RENSTRA 2021-2026				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Peningkatan layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan	Peningkatan jumlah, kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan	Mewujudkan Pelayanan Prima	Meningkatkan profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	Mendorong pengelolaan SDM	Optimalisasi peningkatan kompetensi SDM; Optimalisasi sistem reward dan punishment; Sinkronisasi rencana pengembangan SDM di bagian diklat dengan anggaran yang tersedia; Optimalisasi penempatan SDM sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan.

				Peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat		<p>Pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih</p> <p>Terpenuhinya sarana, prasarana dan alkes sesuai Standar</p>	<p>Capaian standar pelayanan minimal (SPM)</p> <p>Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan</p>	<p>Mendorong pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih</p> <p>Mendorong terpenuhinya sarana, prasarana dan</p>	<p>Percepatan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih.</p> <p>Optimalisasi ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RPJMD 2021-2026					RENSTRA 2021-2026				
Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							(SPA) rumah sakit (ASPAK)	alkes sesuai standar	standar pelayanan rumah sakit kelas B; Optimalisasi pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes belum optimal;
						Meningkatnya manajemen pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Mendorong meningkatnya manajemen pelayanan	Optimalisasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
							Akreditasi Rumah Sakit		Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan kesehatan.

						Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	Mendorong pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SIM RS
						Meningkatnya tata kelola keuangan PPK- BLUD	<i>Cost recovery rate</i>	Mendorong tata kelola keuangan PPK-BLUD	Percepatan penyusunan kebijakan terkait implementasi PPK BLUD
									Percepatan peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dalam

RPJMD 2021-2026					RENSTRA 2021-2026				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
									implementasi kebijakan BLUD
									Percepatan peningkatan kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
									Percepatanan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang memahami prinsip PPK BLUD;
									Percepatan penyampaian dokumen RBA

B A B

VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

*Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.*

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-

2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah RSUD Kecamatan Mandau selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Direktur RSUD Kecamatan Mandau dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah RSUD Kecamatan Mandau dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup RSUD Kecamatan Mandau untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan di bidang pelayanan kesehatan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selengkapnya target-target capaian kinerja RSUD Kecamatan Mandau untuk periode 2021-2026 disajikan pada tabel 7.1. berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja RSUD Kecamatan Mandau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target pencapaian						Kondisi Akhir Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Pelayanan Prima		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%	88%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
2			Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya (3)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)
3		Meningkatkan profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian standar pelayanan minimal (SPM)	90%	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
5		Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Akreditasi Rumah Sakit	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
6			Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	B	B	B	B	B	B	B	B
7		Terpenuhinya sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) rumah sakit (ASPAK)	78%	78%	79%	80%	81%	82%	83%	83%
8		Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	98%	98%	98%	99%	99%	100%	100%	100%
9		Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost recovery rate	38%	38%	38%	39%	39%	40%	42%	42%

Indikator kinerja RSUD Kecamatan Mandau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kecamatan Mandau untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis. Perumusan indikator kinerja RSUD Kecamatan Mandau dalam rencana strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD

Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan perujukan.

B A B

VIII

PENUTUP

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan*

---

### 8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kecamatan Mandau dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran RSUD Kecamatan Mandau sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitas rumah sakit agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra RSUD Kecamatan Mandau tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi RSUD Kecamatan Mandau untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

## **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan awal, menyusun Rancangan Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2016-2021 dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan Mengikuti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, RSUD Kecamatan

Mandau melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra RSUD Kecamatan Mandau adalah sebagai berikut:

1. Renstra RSUD Kecamatan Mandau akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Direktur RSUD Kecamatan Mandau, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Direktur RSUD Kecamatan Mandau melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra RSUD Kecamatan Mandau dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra RSUD Kecamatan Mandau dilakukan melalui Renja RSUD Kecamatan Mandau setiap tahun dan realisasinya melalui DPA RSUD Kecamatan Mandau setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja RSUD Kecamatan Mandau tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKj sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra RSUD Kecamatan Mandau dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja RSUD Kecamatan Mandau diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Disetujui,  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bengkalis



**H. BUSTAMI, HY., SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196409071986031009

Bengkalis, September 2021  
Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Kecamatan Mandau



**dr. CHAIRIAH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740419 200311 2 001

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS AKHIR  
RSUD KECAMATAN MANDAU**

PENGARAH (DIREKTUR) : dr. CHAIRIAH

PENANGGUNGJAWAB

(KABAG TATA USAHA) : SHANTI VERONIGA HANDAYANI, SKM

KETUA (KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM)

: HENDI ASRAWARTA, SKM, M.Si

ANGGOTA : DEVIANTY, SKM

: SOLIKIN, AMd

KEPALA BIDANG HUMAS DAN SDM : IWAN RIDWAN, SKM

KEPALA BIDANG PELAYANAN : drg. ARMEN SOSIALISA

KEPALA BIDANG KEPERAWATAN : RABITA, SST

**Lampiran :**

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kab. Bengkalis Nomor: 700.1.2.8/73/ITDA hal Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

Terkait hal ini terdapat rekomendasi dari Inspektorat Kab. Bengkalis yaitu agar RSUD Kec. Mandau melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) terkait dengan indikator dan sasaran kinerja akibat adanya perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah selaras dengan pohon kinerja perangkat daerah.

Maka dari itu, RSUD Kec. Mandau telah dilakukan revisi Renstra pada tabel 4.1, 5.1, 6.1, dan 7.1

Berikut lampiran revisi Renstra RSUD Kec. Mandau Tahun 2021-2026 :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kepatuhan standar pelayanan publik		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik							
		Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Madya (***)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%	88	90	91	92	93	94
		Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B	B

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan  
Renstra RSUD Kecamatan Mandau 2021-2026

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera**  
**Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dalam Memajukan Perekonomian**

	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Kepatuhan standar pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Mendorong Meningkatkan Pengelolaan SDM	Optimalisasi peningkatan kompetensi SDM; sistem reward dan punishment; dan penempatan SDM sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan serta Sinkronisasi rencana pengembangan SDM di bagian diklat dengan anggaran yang tersedia.
Mendorong meningkatnya manajemen pelayanan					1. Optimalisasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; 2. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan kesehatan.	
Mendorong tata kelola keuangan PPK-BLUD			Percepatan penyusunan kebijakan terkait implementasi PPK BLUD, peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dalam implementasi kebijakan BLUD, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang memahami prinsip PPK BLUD dan penyampaian dokumen RBA sesuai ketentuan			
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Mendorong pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Percepatan promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih
					terpenuhinya sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit ; dan pemeliharaan, kalibrasi sarana, prasarana dan alkes;
					Mendorong pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SIM RS

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2016  
Kabupaten Bengkalis

Urusan : Unsur Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar																									
Bidang Urus: Kesehatan																									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kode	Urusan Bidang Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
									Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
Meningkatnya kepatuhan standar pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	1 02 01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor	93%	93	73.241.588.649	94	73.874.024.435	95	75.078.710.973	96	76.039.487.571	97	77.013.768.767	98	79.467.443.819	98	454.715.024.214		
					1 02 01 2.05		Administrasi kepegawain perangkat daerah	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN	%	100	385.000.000	###	443.000.000	###	605.500.000	###	625.000.000	###	640.500.000	100	722.000.000	100	3.421.000.000		
					1 02 01 2.05 09		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam setahun	orang	0	-	0	-	14	150.000.000	14	155.000.000	14	160.000.000	14	165.000.000	14	165.000.000	56	630.000.000
					1 02 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	orang	14	150.000.000	14	153.500.000	14	155.500.000	14	160.000.000	14	165.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	84	984.000.000
					1 02 01 2.06 06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan	kelom pok	3	35.000.000	3	39.500.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	45.500.000	3	50.000.000	3	50.000.000	18	255.000.000
					1 02 01 2.06 09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas yang	kegiatan	4	200.000.000	4	250.000.000	4	260.000.000	4	265.000.000	4	270.000.000	4	307.000.000	4	307.000.000	24	1.552.000.000
					1 02 01 2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	%	100	28.067.588.649	###	28.126.024.435	###	28.215.710.973	###	28.488.487.571	###	28.697.268.767	100	28.984.943.819	100	170.580.024.214		
					1 02 01 2.02 01		Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	orang	200	28.067.588.649	###	28.126.024.435	###	28.215.710.973	###	28.488.487.571	###	28.697.268.767	200	28.984.943.819	####	170.580.024.214		
					1 02 01 2.03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna	%	100	1.039.000.000	###	1.050.000.000	###	1.100.000.000	###	1.180.000.000	###	1.225.500.000	100	1.350.000.000	100	6.944.500.000		
					1 02 01 2.03 02		Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	orang	34	1.039.000.000	34	1.050.000.000	34	1.100.000.000	34	1.180.000.000	34	1.225.500.000	34	1.350.000.000	204	6.944.500.000		

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KAB. BENGKALIS

1	02	01		Program penunjang urusan pemerintahan	Persentase pelaksanaan kegiatan	%															
1	02	01	2,01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	150.000.000	##	155.000.000	##	170.000.000	##	175.000.000	##	175.250.000	100	250.000.000	100	1.075.250.000	
1	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja RS	Doku men	7	150.000.000	7	155.000.000	7	170.000.000	7	175.000.000	7	175.250.000	7	250.000.000	42	1.075.250.000
1	02	01	2,08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi perkan toran	%	100	2.250.000.000	###	2.455.000.000	###	2.460.500.000	###	2.506.000.000	###	2.556.250.000	100	2.820.000.000	100	15.047.750.000
1	02	01	2,08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	tagihan	5	2.000.000.000	5	2.150.000.000	5	2.155.000.000	5	2.200.000.000	5	2.250.000.000	5	2.500.000.000	30	13.255.000.000
1	02	01	2,08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	orang	5	250.000.000	5	305.000.000	5	305.500.000	5	306.000.000	5	306.250.000	5	320.000.000	30	1.792.750.000
1	02	01	2,09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas	%	100	2.850.000.000	###	2.935.000.000	###	3.000.000.000	###	3.010.000.000	###	3.060.000.000	100	3.150.000.000	100	18.005.000.000
1	02	01	2,09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/ operasional	Unit	12	350.000.000	12	405.000.000	12	450.000.000	12	455.000.000	12	460.000.000	12	500.000.000	72	2.620.000.000
1	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang	orang	60	2.500.000.000	60	2.530.000.000	60	2.550.000.000	60	2.555.000.000	60	2.600.000.000	60	2.650.000.000	360	15.385.000.000
1	02	01			<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>																
1	02	01	2,07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor	%	100	1.350.000.000	###	1.187.000.000	###	1.500.000.000	###	1.510.000.000	###	1.525.500.000	100	1.540.500.000	100	8.613.000.000
1	02	01	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit	30	350.000.000	30	87.000.000	30	200.000.000	30	205.000.000	30	215.500.000	30	225.500.000	180	1.283.000.000
2	03	01	2,07	05	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit		1.000.000.000		200.000.000		300.000.000		305.000.000		310.000.000		315.000.000	-	2.430.000.000
1	02	01	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	unit	0		0	900.000.000	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	36	4.900.000.000



# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KAB. BENGKALIS

1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	91	48.769.203	92	49.190.321	93	49.992.483	94	50.632.233	95	51.280.975	96	52.914.798	96	302.780.013	
1	02	05	2,02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif	Persentase Pelaksanaan Promosi dan	%	100	48.769.203	##	49.190.321	##	49.992.483	##	50.632.233	##	51.280.975	100	52.914.798	100	302.780.013	
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Promosi dan Publikasi Rumah Sakit	%	100	48.769.203	###	49.190.321	###	49.992.483	###	50.632.233	###	51.280.975	100	52.914.798	100	302.780.013
1	02	02		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit	%	100	8.632.148.882	##	8.706.686.859	##	8.848.669.491	##	2.733.000.000	##	9.076.732.635	100	9.410.919.268	100	47.408.157.135	
1	02	02	2,02	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	100	-	##	-	##	25.000.000	##	25.000.000	##	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan pelayanan promosi	Jumlah media jenis		-	-	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000	
1	02	02	###	Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	%	100	-	##	-	##	100.000.000	##	110.000.000	##	115.000.000	100	150.000.000	100	475.000.000	
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pendukung akreditasi	kegiatan	-	-	-	4	100.000.000	4	110.000.000	4	115.000.000	4	150.000.000	16	475.000.000	
1	02	02		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit	%	78	78	79	80	81	82	83	83	83	83	83	83	83	-	
1	02	02	2,01	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah	%	100	8.482.148.882	##	8.555.686.859	##	8.571.669.491	##	2.445.000.000	##	8.782.732.635	100	9.035.919.268	100	45.873.157.135	
1	02	02	2,01	05	Pengembangan rumah sakit	Jumlah kegiatan pengembangan rumah sakit yang dilaksanakan	kegiatan	0	-	0	-	5	150.000.000	5	155.000.000	5	166.000.000	20	621.000.000		
1	02	02	2,01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	kelompok	5	500.000.000	5	510.000.000	5	510.000.000	5	515.000.000	5	520.000.000	5	525.000.000	30	3.080.000.000
1	02	02	2,01	18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	kegiatan	4	897.000.000	4	900.000.000	4	910.000.000	4	920.000.000	4	930.000.000	4	940.000.000	24	5.497.000.000
1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan	kegiatan	3	490.406.082	3	540.000.000	3	550.000.000	3	560.000.000	3	560.000.000	3	580.000.000	18	3.280.406.082
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat kesehatan yang dilaksanakan	kelompok	3	300.000.000	3	300.000.000	3	285.000.000	3	300.000.000	3	320.000.000	3	355.000.000	18	1.860.000.000
1	02	02	2,01	16	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah jenis obat rumah sakit yang disediakan	kelompok	3	3.001.742.800	3	3.006.686.859	3	3.018.669.491	3	3	3	3.066.732.635	3	3.224.919.268	18	15.318.751.053
1	02	02	2,01	17	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit yang disediakan	kelompok	2	3.293.000.000	2	3.299.000.000	2	3.148.000.000	2	2	2	3.231.000.000	2	3.245.000.000	12	16.216.000.000
1	02	01	2,01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0	5	6.228.905.247	5	6.297.732.635	5	6.469.919.268	30	31.534.751.053		
1	02	02		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit	%	98	150.000.000	98	151.000.000	98	152.000.000	99	153.000.000	99	154.000.000	100	200.000.000	100	960.000.000	
1	02	02	2,03	02	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	%	98	150.000.000	98	151.000.000	98	152.000.000	99	153.000.000	99	154.000.000	100	200.000.000	36	960.000.000
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang SIMRS	kegiatan	6	150.000.000	6	151.000.000	6	152.000.000	6	153.000.000	6	154.000.000	6	200.000.000	36	960.000.000
								97.538.405.446		98.380.642.475		99.984.966.004		95.035.560.822		102.561.950.681		105.874.596.244		599.376.121.672	

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja RSUD Kecamatan Mandau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Pencapaian						Kondisi Akhir Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kepatuhan standar pelayanan publik		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik								
		Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Madya (3)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)	Paripurna (5)
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%	88%	90%	91%	92%	93%	94%	94%